



KAJIAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP):

EVALUASI PEMBERIAN BANTUAN
PROGRAM INDONESIA PINTAR TAHUN 2017
DENGAN FASILITAS KIP ATM
PADA KUNJUNGAN KERJA (KUNKER) PRESIDEN RI

Kartu Indonesia Pintar

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2018

**EVALUASI PEMBERIAN BANTUAN
PROGRAM INDONESIA PINTAR TAHUN 2017
DENGAN FASILITAS KIP ATM
PADA KUNJUNGAN KERJA (KUNKER)
PRESIDEN RI**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2018

Evaluasi Pemberian Bantuan Program Indonesia Pintar Tahun 2017 dengan Fasilitas KIP ATM pada Kunjungan Kerja (Kunker) Presiden RI

Tim Penyusun :

Dr. Herlinawati
R. Alpha Amirrachman, Ph.D.
Drs. Philip Suprastowo, PU
Panca Waluyo, MM

ISBN : 978-602-8613-89-7

Penyunting :

Dr. Mahdiansyah, MA
Ir. Yendri Wirda, M.Si.
Lucia H. Winingsih, Ph.D

Penerbit :

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365
Faks. +6221-5741664
Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>
Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, Oktober 2018

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2018

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakkidbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2018 menerbitkan Buku Laporan Hasil Penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2017. Penerbitan Buku Laporan Hasil Penelitian ini dimaksudkan untuk menyebarkan hasil penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan sebagai salah satu upaya untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan wujud akuntabilitas publik.

Hasil penelitian ini telah disajikan di berbagai kesempatan secara terbatas, sesuai dengan kebutuhannya. Buku ini sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Semoga Buku Laporan Hasil Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan Buku Laporan Hasil Penelitian ini.



Jakarta, Juli 2018

Kepala Pusat,

Muktiono Waspodo

NIP 196710291993031002

KATA PENGANTAR

Program Indonesia Pintar (PIP) pada hakekatnya merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk memastikan terlaksanakannya program pemerataan pendidikan dan perluasan akses pelayanan pendidikan yang bermutu khususnya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, peluang keberlanjutan sekolah, pengurangan angka putus sekolah, dan peningkatan prestasi.

Pemerintah bertekad melaksanakan seluruh program tersebut melalui percepatan-percepatan. Salah satunya adalah dengan memberikan secara langsung Kartu Indonesia Pintar (KIP) oleh Presiden RI kepada siswa-siswa sekolah pada saat kunjungan kerjanya (kunker). Presiden RI telah menyerahkan kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 47.604 siswa di 39 Kabupaten/Kota. KIP yang dibagikan terdiri 12.860 KIP ATM (27%) dan 34.744 Kartu KIP regular/Kartu KIP Bukan ATM (73%). Untuk melihat sampai sejauhmana keefektifan dan keberhasilan program pemberian KIP ini, perlu dilakukan analisis kajian yang komprehensif.

Oleh karena itu tujuan kajian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kebijakan tentang startegi yang efektif dan efisien dalam Penyaluran, Pencairan, dan Pemanfaatan KIP ATM untuk menjamin equity serta pemanfaatan dana PIP yang efektif untuk mendukung siswa menyelesaikan dan melanjutkan pendidikannya dengan prestasi yang terbaik.

Jakarta, Desember 2017

Hormat Kami,

Tim Kajian PIP

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Kebijakan.....	18
C. Tujuan	19
D. Hasil Yang Diharapkan.....	19
E. Limitasi.....	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Konsep Pemerataan Pendidikan.....	21
B. Aksesibilitas	25
C. Efektivitas.....	28
D. Ukuran Efektivitas.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	19
B. Populasi dan Sampel.....	19
C. Teknik Pengambilan Sampel.....	19
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Variabel studi	42
F. Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Profil Responden.....	24

	B. Penyaluran KIP ATM.....	25
	C. Pencairan KIP ATM.....	31
	D. Pemanfaatan KIP ATM.....	35
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKAN	41
	A. Simpulan.....	41
	B. Saran.....	42
	DAFTAR PUSTAKA	44

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan Pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Untuk mewujudkannya pemerintah mencanangkan kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang diarahkan pada tersedia dan terjangkau layanan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota yang dilakukan antara lain melalui strategi pemberian subsidi (Kemendikbud, 2015). Pencanaan kebijakan tersebut telah sejalan dengan salah satu dari sembilan cita dalam Nawacita yang dicanangkan presiden Joko Widodo di bidang pendidikan yakni “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia” yang secara spesifik dilaksanakan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) sekaligus sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya Wajib Belajar 12 Tahun (RPJM, Bappenas, 2015).

Arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun ini dilaksanakan dengan cara melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar yang berkualitas untuk menjamin seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali agar dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar dengan memberikan peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak yang berada di daerah pasca-konflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); serta penyediaan bantuan untuk anak yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat mengikuti Program Indonesia Pintar (PIP) pada pendidikan dasar yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)(Kemendikbud, 2015).

Kebijakan pemberian subsidi kepada siswa melalui PIP ini didasari bahwa tantangan terbesar dari pembangunan pendidikan di Indonesia saat ini ialah bagaimana layanan pendidikan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia terutama oleh lapisan masyarakat yang memiliki kendala ekonomi. Hingga saat ini, disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat masih cukup tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) keluarga yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan APK keluarga tidak mampu. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung peserta didik. Biaya langsung peserta didik meliputi antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung peserta didik meliputi antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain.

Tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung peserta didik tersebut tidak lepas dari tingginya biaya hidup masyarakat. BPS pada tahun 2016 telah merilis jumlah kotadengan biaya hidup tinggi. Dari survei yang dilakukan menunjukkan bahwa dari 82 kota, Jakarta merupakan kota dengan biaya hidup tertinggi yakni Rp7.500.726 per bulan, sedangkan Banyuwangi merupakan kota dengan biaya hidup terendah yakni Rp3.029.367 per bulan. Secara nasional, rata-rata biaya hidup adalah sebesar Rp5.580.037 per bulan.



Sumber: BPS, 2016

Gambar 1.1 Hasil Survey 10 kota di Indonesia Berbiaya Hidup Tinggi

Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan tingginya angka putus sekolah (*drop out*), sehingga berpengaruh terhadap APK. Untuk menjawab tantangan itu, berbagai kebijakan dan program terus diupayakan oleh Pemerintah diantaranya Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut. Melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, untuk membangun keluarga produktif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan PIP. Program ini dimaksudkan untuk menjamin akses layanan pendidikan dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat yang memiliki kendala ekonomi, melalui pemberian bantuan biaya pendidikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga miskin/rentan miskin. Lebih spesifik tujuan program ini antara lain: (1) meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah serta dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun; (2) mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; (3) menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Lembaga Kursus dan Pelatihan (Dikdasmen Kemendikbud, 2015).

Program Indonesia Pintar menjangkau siswa dari jalur pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) dan non formal (SKB/PKBM, Lembaga Kursus dan Pelatihan).

Implementasi PIP merupakan kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sekaligus untuk mendorong implementasi Pendidikan Menengah Universal/rintisan wajib belajar 12 tahun. Dengan besarnya sasaran PIP 2015 yang mencapai 20,3 juta anak/siswa usia sekolah baik di sekolah/lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (17,9 juta anak/siswa) maupun Kementerian Agama (2,4 juta anak/siswa), diharapkan akan dapat mengatasi rendahnya APK sekaligus sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan bekal pendidikan yang lebih baik. Sasaran PIP adalah anak berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang merupakan: (1) Penerima BSM 2014 Pemegang KPS; (2) Siswa/anak dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP yang belum menerima BSM 2014; (3) Siswa/anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) non KPS; (4) Siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari Panti Sosial/Panti Asuhan; (5) Siswa/anak yang terkena dampak bencana alam; (6) Anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang tidak bersekolah (*drop-out*) yang diharapkan kembali bersekolah; (7) Siswa/anak dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah atau siswa/ anak dengan pertimbangan khusus lainnya (seperti kelainan fisik, korban musibah, orang tua PHK, berada di daerah konflik, dari keluarga terpidana, memiliki lebih dari 3 saudara, siswa SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang tertentu); dan (8) Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya (Dikdasmen Kemendikbud, 2015).Namun pada tahun 2017 prioritas penerima dana PIP dengan fasilitas KIP ATM yaitusiswa/anak

yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari Panti Sosial/Panti Asuhan.

Kebijakan pemberian subsidi kepada siswa miskin ini strategis mengingat siswa yang berasal dari keluarga miskin ditengarai rawan terhadap terjadinya putus sekolah dan mengulang kelas. Indikasinya tampak dari hasil Susenas tahun 2011 (TNP2K, 2012) yang mengungkapkan bahwa terjadinya putus sekolah sebagian besar (75%) disebabkan oleh alasan ekonomi, yaitu karena tidak memiliki biaya (67%) dan karena anak harus bekerja (9%). Kendati pemerintah secara bertahap telah membebaskan seluruh beban biaya operasi satuan pendidikan menuju pendidikan dasar bebas biaya, namun masih banyak keluarga miskin yang tidak mampu memenuhi biaya pribadi yang harus dikeluarkan oleh siswa seperti untuk biaya transport, seragam, perlengkapan sekolah dan lain-lain. Kondisi tersebut jelas menunjukkan bahwa penduduk miskin tidak akan mampu menjangkau pendidikan jika tidak dibantu subsidi oleh pemerintah. Keadaan tersebut akan berdampak pada menurunnya angka partisipasi pendidikan penduduk miskin terutama disebabkan oleh banyaknya siswa putus sekolah dan angka tidak melanjutkan hingga jenjang pendidikan menengah. Oleh sebab itu, diharapkan pemberian subsidi kepada siswa miskin dapat efektif agar siswa tetap bersekolah dan melanjutkan pendidikannya tanpa dihalangi oleh masalah ekonomi. Langkah tersebut tampaknya tepat, mengingat hasil studi Baines (1999) menemukan bahwa bantuan finansial kepada siswa menunjukkan pengaruh positif terhadap menurunnya angka putus sekolah (APS) hingga mencapai 2%. Bahkan Linda Hemasaputri (2010) yang

melakukan studi di Pacitan Jawa Timur, menemukan adanya pengaruh positif subsidi siswa miskin terhadap prestasi belajar siswa. Oleh sebab itu, Pemerintah terus berupaya memberikan subsidi kepada siswa miskin guna mengurangi APS.

Tabel 1.1. Perkembangan APS Tahun 2010/2011 2014/2015

No	Satuan Pendidikan	Tahun Ajaran 09/10--10/11		Tahun Ajaran 10/11--11/12		Tahun Ajaran 11/12--12/13		Tahun Ajaran 12/13--13/14		Tahun Ajaran 13/14--14/15	
		Jumlah	%								
1	SD/MI	439.033	1,61	248.988	0,90	352.673	1,28	294.045	1,10	176.909	0,67
2	SMP	166.328	1,80	146.871	1,57	134.824	1,43	137.436	1,42	85.000	0,87
3	SMA	139.998	3,55	47.709	1,16	42.471	1,01	42.008	0,98	68.219	1,59
4	SMK	98.640	2,97	124.792	3,34	124.791	3,10	129.037	3,08	86.282	2,05

Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud (2015)

Data APS dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan (Kemdikbud, 2015) menunjukkan dari tahun ke tahun dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung terjadi penurunan yang berarti, terutama untuk jenjang SD dan SMP (Tabel 1.1) APS SD dan SMP pada tahun 2015 yakni 0,67% dan 0,87%, merupakan penurunan yang cukup signifikan dari APS pada tahun sebelumnya (2014) yakni SD sebesar 1,10% dan SMP 1,42%. Jika angka tersebut akurat maka APS untuk SD dan SMP pada tahun 2015 tersebut telah melampaui target yang dicanangkan dalam Renstra 2010-2014, yakni SD sebesar 1,1%

dan SMP sebesar 1,6%. Kendati demikian APS di sekolah menengah menunjukkan angka yang masih tinggi, yakni SMA 1,59% dan SMK 2,05%. APS di pendidikan menengah ini masih termasuk tinggi dan menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan faktor putus sekolah ini dalam upaya mewujudkan pelaksanaan Wajar 12 tahun.

Angka putus sekolah memiliki hubungan yang erat dengan angka partisipasi pendidikan. Besarnya APS memberikan kontribusi terhadap angka partisipasi pendidikan. Ini terkait dengan target angka partisipasi pendidikan yang dicanangkan harus tercapai pada tahun 2019 sebagaimana diamanatkan dalam Renstra Kemdikbud Tahun 2015-2019. Kondisi awal, yakni pada tahun 2014 rata-rata APK SD baru mencapai 97,31%, APK SMP 74,29%, APK SM 68,92%; sedangkan target APK yang harus tercapai pada tahun 2019 relatif cukup besar yakni SD 100,55%, SMP 83,77%, dan SM 85,71%.

Tabel 1.2. Peningkatan APK

Jenjang	2015	2016	2017
SD	97,3	97,6	100,5
SMP	74,2	80,7	93,7
SMA/SMK	68,9	75,7	85,7

Demikian halnya dengan kondisi APM pada tahun 2014 dan target APM yang perlu dicapai pada tahun 2019, masih terjadi kesenjangan yang cukup besar (lihat Tabel 1.3). Masalah krusial lain yang masih perlu mendapatkan perhatian untuk

ditangani yaitu terjadinya disparitas angka partisipasi pendidikan antarwilayah, antarpenduduk, kaya-miskin. Rata-rata angka partisipasi pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah di wilayah timur Indonesia sebagian besar berada di bawah rata-rata angka partisipasi pendidikan nasional, dan jauh lebih rendah dari provinsi lain di bagian barat. Secara nasional, disparitas di tingkat sekolah menengah antarkabupaten/kota juga masih tinggi, yakni sebesar 29,0%. (Renstra Kemendikbud 2015-2019).

Tabel 1.3. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS): APK dan APM

SS/IKSS	Sat	Kondisi Awal					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%	%	97,31	97,65	97,85	98,02	99,92	100,55
APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,2%	%	81,92	82,00	82,51	82,88	84,52	85,20
APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 83,77%	%	74,29	80,73	81,89	82,40	83,61	83,77
APM SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 73,72%	%	59,18	71,88	72,69	73,07	73,70	73,72

SS/IKSS	Sat	Kondisi Awal					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin & 20% penduduk terkaya sebesar 0,9	Rasio	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.9
APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurang-kurangnya 85,7 %	%	68,92	75,70	79,31	82,15	84,09	85,71
APM SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 67,5%	%	60,56	63,76	66,87	69,49	71,12	73,05
Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0,6	Rasio	0.53	0.54	0.55	0.57	0.58	0.60

Sumber Renstra Kemdikbud 2015-2019

Menyikapi masih tingginya APS dan permasalahan disparitas APK dan APM, pada tahun 2013 Kemendikbud pernah mencanangkan dimulainya Gerakan Anti Putus Sekolah. Lebih-lebih pada tahun 2012 terdapat tidak kurang dari 1,5 juta anak tidak dapat sekolah dan melanjutkan studi ke jenjang

pendidikan yang lebih tinggi. *Treatment* yang ditawarkan untuk menekan angka putus sekolah, selain memperbaiki mekanisme penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), juga memberikan bantuan kepada siswa miskin. Pada saat itu tercatat telah ada sebanyak 8 juta anak penerima subsidi siswa miskin dengan total anggaran sekitar Rp 4 triliun dari siswa SD hingga SMA yang telah menerima subsidi, namun jumlah tersebut belum dapat menjangkau seluruh siswa miskin yang berada di satuan pendidikan tersebut (<http://headline.koranpendidikan.com/>). Jumlah anggaran subsidi siswa pada tahun 2013 tersebut jauh lebih besar jika dibanding dengan subsidi tahun 2012 yang total anggarannya Rp 2.816.529.200.000 dengan jumlah penerima subsidi sebanyak 5.753.860 siswa. Pada era pemerintahan Jokowi saat ini, anggaran PIP ditingkatkan dengan jumlah yang jauh lebih besar, yakni hampir dua kali lipat dari tahun 2013. Pada tahun 2016 ini besaran dana BSM/PIP 2016 yaitu sebesar Rp. 10.424.340.157.000,- dengan sasaran sebanyak 17.927.308 siswa yang rinciannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1.4: Dana Bantuan Siswa Miskin (PIP) Th 2015/2016

Jenjang Pendidikan	2015		2016*	
	Sasaran	Anggaran	Sasaran	Anggaran
Kemendikbud				
SD	10,470,610	4,711,774,500,000	10,360,614	4,299,010,725,000
SMP	4,249,607	3,187,205,250,000	4,369,968	3,325,099,770,000
SMA	1,353,515	1,353,515,000,000	1,367,559	1,391,564,000,000
SMK	1,846,538	1,846,538,000,000	1,829,167	1,408,665,662,000
Jumlah Kemendikbud	17,920,270	11,099,032,750,000	17,927,308	10,424,340,157,000
Kemenag				
Mi/Ula/Sederajat	877,992	395,096,400,000	567962	255,607,900,000
MTs/Wustha/Sederajat	1,020,616	765,462,000,000	671862	503,787,000,000
MA/Ulya/Sederajat	552,964	552,965,000,000	380378	380,980,000,000
Jumlah Kemenag	2,451,572	1,713,523,400,000	1,620,202	1,140,374,900,000
Total	20,371,842	12,812,556,150,000	19,547,510	11,564,715,057,000

Sumber: Ditjen Dikdasmen (2015)

Pada tahun Tahun Ajaran 2016/2017, secara garis besar diberikan dana PIP masing-masing kepada siswa SD sebesar Rp. 450.000, siswa SMP sebesar Rp750.000, siswa SMA dan SMK sebesar Rp1.000.000 per siswa per tahun. Ada catatan bagi siswa yang berada di kelas akhir pada setiap jenjang pendidikan, hanya memperoleh setengah dari jumlah dana PIP per tahun. Besaran dana PIP per siswa tersebut sudah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah dinilai penting agar dapat mencukupi biaya pribadi siswa, seperti untuk uang transpor, biaya seragam, perlengkapan sekolah dan lain-lain. Peningkatan pemberian subsidi siswa miskin tersebut didasarkan pada hasil evaluasi yang mengindikasikan jumlah subsidi yang telah diberikan tersebut belum dapat menutup beban biaya pribadi siswa. Bank Dunia (TNP2K, 2012) menemukan bahwa satuan biaya SSM diketahui belum dapat mencakup seluruh biaya pribadi pendidikan siswa miskin.

Peningkatan pelaksanaan PIP oleh pemerintah dilakukan dengan menyimak pelaksanaan PIP baik segi efektivitas sasaran penerima, besaran dana yang diterima, dan waktu penerimaan dana PIP. Hasil Penelitian Puslitjak (2013) memperlihatkan bahwa sasaran penerima PIP belum menjangkau siswa miskin di sekolah, dan bahkan beberapa siswa yang seharusnya tidak berhak menerima PIP memperoleh dana PIP. Demikian pula waktu penerimaannya juga tidak menentu sehingga dana PIP tidak dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung kegiatan belajar siswa. Evaluasi tentang efektivitas pelaksanaan dari segi sasaran penerima, waktu menerima, dan besaran dana yang

sampai di tangan siswa juga dilakukan oleh Dirjen Dikdasmen (2015). Hasilnya baik dari segi sasaran, waktu dan jumlah dana belum mencapai efektivitas yang maksimal.

Hasil kajian Puslitjak (2015) menemukan bahwa besarnya subsidi yang diterima siswa tersebut masih dirasakan belum dapat mengatasi kebutuhan biaya personal siswa. Pemberian dana PIP diarahkan untuk mengkompensasi biaya tidak langsung yang harus dibayar oleh orang tua dari keluarga miskin. Dana PIP digunakan untuk membayar biaya langsung, bahkan untuk SMK siswa menerima sisa dana PIP 5%-10%, dan siswa SMP yang terdaftar pada SMP swasta juga harus menanggung biaya langsung, terutama biaya operasional. Besaran dana yang diterima oleh siswa sekitar 5% untuk siswa SMK, 10% untuk siswa SMP dan SMA dari jumlah dana PIP yang dialokasikan per siswa. Sebelum dana diserahkan kepada siswa, dana sudah dipotong oleh sekolah untuk membayar tunggakan iuran sekolah yang berkisar 4 sampai dengan 6 bulan. Begitu pula dengan ketepatan penggunaan dana PIP yang diukur berdasarkan alokasi penggunaan dana PIP yang diterima siswa.

Hasil diskusi terbatas melalui kelompok terpumpun dan isian kuesioner siswa menemukan adanya siswa yang menggunakan dana PIP untuk keperluan di luar biaya pribadi siswa, yaitu untuk membeli bahan pangan (sembako), 32,3% untuk berobat, 12,9% membayar hutang keluarga 3,9%, 5,6% membeli pulsa. Informasi tersebut memberikan gambaran masih adanya dana yang tidak tepat penggunaannya (Puslitjak, 2016). Dari temuan studi tersebut maka kebijakan PIP akan

terus diperbaiki dari segi efektivitasnya. Dalam jangka panjang diharapkan PIP memberikan kontribusi yang positif terhadap keberlangsungan siswa dalam belajar (tidak mengulang kelas dan putus sekolah), memotivasi siswa untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan prestasi yang terbaik.

Program Indonesia Pintar bagi siswa miskin terus semakin ditingkatkan baik dari segi jumlah penerima maupun besaran dana per siswa. Ini dilakukan sebagai *quality assurance* terutama untuk menjamin siswa miskin tetap bersekolah, mampu melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, bahkan dengan prestasi yang tinggi. Kemendikbud untuk tahun 2018 telah memberikan porsi anggaran lebih besar pada Program Indonesia Pintar (pagu indikatif). Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk PIP tersebut tergambar pada gambar berikut:



Sumber : Biro PKLN Kemendikbud 2018

Gambar 1.2 (Pagu Indikatif)
 Besaran Anggaran Untuk Program-program Pendidikan di
 Kemendikbud 2018

Untuk mewujudkan nawacita kelima (5) tersebut yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, sekaligus sebagai upaya untuk mempercepat program prioritas Kemendikbud yakni terwujudnya Wajib Belajar 12 Tahun, Presiden RI dalam setiap kunjungannya (kunker) ke beberapa daerah di Indonesia telah membagikan KIP kepada siswa-siswa yang tidak mampu. Presiden RI telah menyerahkan kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 47.604 siswa di 39 Kabupaten/Kota. KIP yang dibagikan terdiri KIP ATM 12.860 (27%) dan 34.744 Kartu KIP Reguler (Bukan ATM) (73%), (Dikdasmen Kemendikbud, 2017). Daerah-daerah yang telah dikunjungi presiden terkait dengan pemberian KIP adalah sebagai berikut.

Tabel 1.5. Pemberian KIP Kunjungan Kerja Presiden

Lokasi	Jumlah Penerima
Bali	1000
Banten	1170
D.I Yogyakarta	2748
Jawa Barat	7674
Jawa Tengah	17577
Jawa Timur	5472
Kalimantan Barat	1454
Kalimantan Selatan	1980
Kepulauan Riau	807
Maluku	1265
Maluku Utara	121
Papua	642
Sumatera Utara	2521
DKI Jakarta	2846
Kalimantan Utara	327
Grand Total	47604

Sumber: Dikdasmen, Kemendikbud, 2017

Di tahun 2017, Kemendikbud meluncurkan KIP yang agak berbeda fungsinya dengan sebelumnya, yaitu menjadi KIP Plus (KIP ATM). Kemendikbud dan Bank BRI meresmikan peluncuran KIP Plus. Dengan adanya KIP Plus ini siswa diharapkan bisa lebih mengenal dunia perbankan, juga sebagai sarana menabung dan menerima dana PIP tadi. Dengan kegunaan KIP Plus sebagai kartu ATM juga, bisa dilihat apa saja kegiatan yang sudah dilakukan para siswa dalam menggunakan dana PIP-nya. Penyaluran dana pun menjadi lebih mudah. Siswa juga dimudahkan karena KIP Plus tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.

Untuk KIP Plus dari BRI ini memiliki tiga kegunaan yaitu, sebagai kartu debit *private label*, *wallet* PIP dan kartu ATM BRI. Kartu *debit private label* maksudnya digunakan untuk belanja perlengkapan sekolah di toko dan koperasi sekolah yang menggunakan mesin *Electronic Data Capture (EDC)* BRI. Uang yang dipakai untuk belanja pun berasal dari saldo awal yang ada pada *wallet* PIP sesuai dana PIP yang ditentukan Kemendikbud.

Namun demikian, pelaksanaan pendistribusian KIP Plus ini dapat dinilai berhasil manakala program tersebut mencapai sasaran serta berdampak positif sebagaimana direncanakan yakni terwujudnya kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang bermutu, agar siswa mampu menyelesaikan pendidikan dan berpeluang melanjutkan pendidikan.

B. Pertanyaan Penelitian

Pemerintah telah melaksanakan PIP dengan jumlah dana yang cukup besar. Program tersebut pada hakekatnya merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk memastikan terlaksanakannya program pemerataan pendidikan dan perluasan akses pelayanan pendidikan yang bermutu khususnya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, peluang keberlanjutan sekolah, pengurangan angka putus sekolah, dan peningkatan prestasi. Penurunan angka putus sekolah dan angka melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi (angka partisipasi) belum mencapai target yang diharapkan (Renstra Kemendikbud 2015-2019).

Presiden telah membagikan KIP ATM di tujuh daerah yang merupakan wilayah kunjungan kerja (kunker) Presiden RI. Kajian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yakni sampai sejauhmana keefektifan dan implementasi KIP di wilayah kunker Presiden RI? Apakah pendistribusian/penyaluran KIP ATM telah berjalan dengan baik? Bagaimana cara pencairan dana KIP ATM dan apakah semua dana bisa tercairkan? Bagaimana dengan pihak lembaga penyalurnya? Apakah ada kendala pada saat pencairan di *merchant-merchant* atau pun di mesin ATM nya? Bagaimana Pemanfaatan Kartu KIP ATM itu sendiri? Apakah sudah dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan? Bagaimana dengan kecukupan dana PIP tersebut?

C. Tujuan

Kajian “Evaluasi Implementasi KIP ATM di Daerah Kunjungan Kerja Presiden RI” diarahkan untuk memberikan tiga rekomendasi kebijakan guna menjawab permasalahan yang dihadapi dalam program tersebut.

- a. **Pertama**, strategi pemerintah, pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melaksanakan pendistribusian KIP ATM ditinjau dari segi Bank Penyalur, Dinas Pendidikan, Sekolah, dan Orangtua.
- b. **Kedua**, strategi pencairan KIP ATM ditinjau dari segi ketepatan besarnya dana yang dicairkan sesuai ketentuan, waktu pencairan dan prosedur pencairan.
- c. **Ketiga**, efektivitas pemanfaatan kartu KIP ATM oleh siswa ditinjau dari dana bantuan pendidikan PIP (perlengkapan sekolah, berbelanja keperluan belajar di *merchant* yang ditunjuk oleh bank ataupun di koperasi sekolah yang memiliki fasilitas mesin *Electronic Data Capture (EDC)* dan juga terkait dengan dana personal siswa (transport, jajan siswa), lainnya (di luar ketentuan).

D. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kajian ini adalah tersusunnya rekomendasi kebijakan mengenai strategi pelaksanaan KIP ATM untuk menjamin *equity* dan pemanfaatan dana yang efektif yang dapat mendukung siswa menyelesaikan

pendidikan dengan prestasi terbaik. Arah Rekomendasi kebijakan terkait dengan aspek berikut.

1. Strategi Penyaluran/distribusi KIP ATM
2. Strategi Pencairan KIP ATM
3. Efektivitas Pemanfaatan KIP ATM

E. Limitasi

Kajian ini dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan kesetaraan (SD,SMP,SMA, dan SMK, serta Paket A,B,C). Sasaran penerima bantuan adalah siswa penerima PIP pada tahun 2017 yang bersekolah di sekolah negeri, swasta dan di PKBMserta merupakan wilayah kunjungan kerja Presiden RI. Analisis keefektifan dilakukan pada aspek ketepatan sasaran, pendistribusian kartu, pencairan dana, waktu penerimaan dana serta pemanfaatan dana tunai PIP terkait kebutuhan pendidikan/biaya pribadi siswa. KIP yang dievaluasi adalah KIP ATM.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pemerataan Pendidikan

Pemerataan Kesempatan untuk memperoleh pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan kita. Strategi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi tiga hal yang mendasar yaitu: 1) Persamaan kesempatan dalam memperoleh pendidikan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; 2) aksesibilitas, dapat dijelaskan bahwa setiap orang tanpa memandang asal usulnya mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan pada semua jenis dan jalur pendidikan; dan 3) keadilan dan atau kewajaran (*equity*) dijelaskan bahwa perlakuan kepada peserta didik sesuai dengan keadaan internal dan eksternal peserta didik, dalam arti adalah wajar dan adil jika peserta didik diperlakukan sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting, *equality* dan *equity*. *Equality* berarti persamaan kesempatan memperoleh pendidikan, dan *equity* berarti keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan. Coleman (2003) dalam bukunya *Equality of Educational Opportunity* membagi pemerataan secara konseptual menjadi pasif dan aktif. Dengan kata lain implikasinya siswa tidak hanya memperoleh kesempatan

pendidikan, tapi juga harus diperlakukan samaguna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensinya secara optimal. Sementara itu menurut Fientje (2006) dimensi pemerataan Pendidikan mencakup; (a) *equality of access*, (b) *equality of survival*, (c) *equality of output*, (d) *equality of outcome* (Fientje, 2006).

Pertama, pemerataan kesempatan memasuki sekolah (*equality of access*). Konsep ini berkaitan erat dengan tingkat partisipasi pendidikan sebagai indikator kemampuan sistem pendidikan dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan ini dapat dikaji berdasarkan dua konsep yang berlainan, yaitu pemerataan kesempatan (*equality of access*) dan keadilan (*equity*) di dalam memperoleh pendidikan.

Kedua, pemerataan kesempatan untuk bertahan di sekolah (*equality of survival*). Konsep ini menitikberatkan pada kesempatan setiap individu untuk memperoleh keberhasilan dalam pendidikan dan pelatihan. Jenis analisis ini mencurahkan perhatian pada tingkat efisiensi internal sistem pendidikan dilihat dari beberapa indikator yang dihasilkan dari metode kohort. Metode ini mempelajari efisiensi pendidikan berdasarkan murid-murid dibandingkan dengan murid-murid yang mengulang kelas dan putus sekolah.

Ketiga, pemerataan kesempatan untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar (*equality of output*). Dilihat dari sudut pandang perseorangan, *equality of output* ini menggambarkan kemampuan sistem pendidikan dalam

memberikan kemampuan dan keterampilan yang tinggi kepada lulusan tanpa membedakan variabel suku bangsa, daerah, status sosial ekonomi, dan sebagainya. Konsep output pendidikan biasanya diukur dengan prestasi belajar akademis. Konsep ini menggambarkan seberapa jauh sistem pendidikan itu efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas, efektif dalam mengisi kekurangan tenaga kerja yang dibutuhkan, dan mampu melakukan kontrol terhadap kemungkinan kelebihan tenaga kerja dalam hubungannya dengan jumlah yang dibutuhkan oleh lapangan kerja.

Keempat, pemerataan kesempatan dalam menikmati manfaat pendidikan dalam kehidupan masyarakat (*equality of outcome*). Konsep ini menggambarkan keberhasilan pendidikan secara eksternal (*external efficiency*) dari suatu sistem pendidikan dan pelatihan dihubungkan dengan penghasilan lulusan individu, jumlah dan komposisi lulusan disesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja (masyarakat), dan yang lebih jauh lagi pertumbuhan ekonomi (masyarakat). Teknik yang biasa digunakan adalah biasanya meliputi analisis *rate of return* terhadap pendidikan, hubungan pendidikan dengan kesempatan kerja, fungsi produksi pendidikan dengan menggunakan pendekatan “*status attainment analytical model*” dan sebagainya.

Menurut Taufikurrachman Saleh (2009), harus ada kemauan politik yang sangat keras untuk membuat kebijakan pemerataan pendidikan yang berpihak pada rakyat. Kemudian harus ada kebijakan di tingkat makro dengan strategi subsidi silang di semua jalur dan jenjang pendidikan Indonesia.

Keluarga kaya diwajibkan memberikan biaya pendidikan dan subsidi terhadap siswa dari keluarga miskin. Sehingga perlu ada *political will* dari semua pihak terutama pemerintah dan legislatif untuk melaksanakan program ini sebagai bentuk pelayanan publik maka perlu perhatian besar bahwa pendidikan lebih dianggap sebagai *public goods*, yaitu pemerintah memegang peranan yang amat mendasar khususnya dalam penyediaan kesempatan belajar dan tidak menutup kemungkinan untuk pihak swasta untuk menyediakannya. Pesatnya pertumbuhan penduduk merupakan beban yang sangat berat bagi pemerintah untuk menyediakan pemerataan kesempatan pendidikan bagi masyarakatnya. Studi Danim (2005:247) menjelaskan bahwa pemerataan kesempatan pendidikan (*equality of educational opportunity*) mengambil dimensi aksesibilitas pendidikan (*educational accessibility*) dan ekuitas atau keadilan pendidikan (*educational equity*) itu sendiri. Namun demikian faktor-faktor kultural, perbedaan individual, bias jender, kemampuan ekonomi keluarga, lingkungan geografis dan lain-lain, meskipun terbuka hak dan peluang yang sama namun selalu muncul perbedaan akses populasi untuk menerima layanan pendidikan dan pembelajaran yang layak.

Studi yang dilakukan Coleman (1966) dalam Suryadi dan Tilaar (1993), mengarah pada pemerataan pendidikan. Studi ini menjelaskan bahwa latar belakang keluarga secara mengejutkan lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan pengaruh faktor-faktor sekolah, tentu saja dapat diterangkan dengan suatu teori mengenai mutu kehidupan masing masing etnis. Kebiasaan belajar yang diturunkan oleh orang tua

mereka membuat suatu lingkungan yang mengakibatkan mereka memiliki motivasi dan kebiasaan untuk belajar. Namun yang sangat penting dalam studi Coleman adalah keberhasilan dalam membedakan pemerataan kesempatan pendidikan secara pasif, dengan pemerataan pendidikan secara aktif. Artinya pemerataan secara pasif adalah lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar ke sekolah, sedangkan untuk pemerataan aktif ialah kesempatan yang sama diberikan oleh sekolah kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar yang setinggi-tingginya.

Komponen-komponen konsep pemerataan pendidikan ini secara lebih jelas diungkapkan oleh Schiefelbein dan Farrell (1982) dalam Suryadi dan Tilaar (1993) menyatakan bahwa pemerataan pendidikan atau *equality of educational oportunity* tidak terbatas pada apakah murid memiliki kesempatan yang sama untuk masuk sekolah (pemerataan Kesempatan pendidikan secara pasif menurut coleman) tetapi lebih dari itu, murid tersebut harus memperoleh perlakuan yang sama sejak masuk, belajar, lulus sampai dengan memperoleh manfaat dari pendidikan yang mereka ikuti dalam kehidupan masyarakat.

B. Aksesibilitas

Aksesibilitas mengandung makna dari kata akses yakni sebagai tempat untuk jalan masuk, sedangkan aksesibilitas adalah hal yang dapat masuk dan mudah dijangkau atau dicapai, memberikan jalan yang mudah, boleh menggunakan dan dapat juga diartikan daya jangkau, daya capai, atau kesempatan peluang (Echols dan Shadily, 1996:5).

Aksesibilitas juga memiliki aneka macam ragam istilah, Frank (1992: 842), berpendapat bahwa aksesibilitas adalah sinonim dengan availibilitas (ketersediaan). Sehingga antara akses (aksesibilitas) dan ketersediaan (*availability*) sebenarnya tidak dapat dibedakan. Misalnya antara akses terhadap kesempatan untuk memperoleh pendidikan dengan tersedianya beberapa fasilitas dalam pemerataan pendidikan. Ada 3 (tiga) aspek dalam kesempatan untuk memperoleh pendidikan (Achmady, 1994: 23), yaitu: (1) ada aspek persamaan kesempatan (*equality of opportunity*), (2) ada aspek aksesibilitas (*accessibility*), dan (3) aspek keadilan atau kewajaran (*equity*). Ketiga aspek tersebut kiranya dapat dijabarkan sebagai berikut: persamaan kesempatan, atau ekualitas, dapat diartikan sebagai bahwa setiap orang sebenarnya pada dasarnya memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak dibedakan menurut jenis kelamin, pendidikan adalah untuk semua orang (*education for all*). Aksesibilitas, artinya adalah pada prinsipnya setiap orang tanpa harus melihat asal usulnya mempunyai kesempatan dan akses yang sama terhadap pendidikan.

Aday dan Andersen (1975) mengembangkan pemikiran bahwa akses diartikan sebagai pemanfaatan pelayanan yang dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempermudah proses pemanfaatan tersebut. Moesley (1979:56) menegaskan:

“Whenwe talk about something being accessible we are referring, to put it crudely, to degree a program to which is get able....”

Akses adalah satu ukuran dalam pelayanan publik yang relatif kompleks. Aday and Andersen (1975) mendefinisikan akses dalam konteks indikator struktural seperti karakteristik sistem pelayanan dan dalam konteks keinginan, yaitu kebutuhan dan sumberdaya yang muncul dalam proses pencarian pelayanan. Akses terkait dengan beberapa konsep antara lain:

1. Adanya kesesuaian antara klien dengan sistem pelayanan itu sendiri, dapat dipahami bila terjadi kecocokan baik itu menyangkut sistem pelayanan dengan apa yang dibutuhkan oleh klien maka akses akan mudah untuk didapat dan memenuhi kebutuhan antara keduanya.
2. Suatu jaminan ketersediaan sumber daya, ketersediaan sumber daya akan memicu akses seseorang untuk memperoleh yang diinginkannya. Keterkaitan pihak sebagai klien (penyedia) dengan yang membutuhkan (*demand*) sangat mendukung pelaksanaan akses itu sendiri.
3. Pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan, akan menjadikan akses keduanya terhubung dengan baik dan akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan suatu bentuk pelayanan tersebut.

Akses dapat dijadikan kerangka konseptual untuk mengukur kemampuan organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan serta kemampuan untuk mengurangi ketimpangan sosial yang terdapat di masyarakat (Effendi, 1986). Ascobat Gani (1981) mengungkapkan konsep *demand* seperti dalam teori ekonomi, sehingga konsumsi seseorang terhadap pelayanan publik adalah kombinasi antara keinginan

dengan jumlah uang yang dimiliki untuk memperolehnya. Jumlah barang yang dikonsumsi oleh konsumen akan dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain; 1) *the price of goods*, 2) *the consumers taste and preference*, 3) *the number of customers under consideration*, 4) *costumer income*, 5) *the price of related goods*, 6) *the range of goods available to the consumers*.

C. Efektivitas

Efektivitas selalu berkaitan hubungannya antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Efektivitas dimaknai sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran (Etzioni, dkk dalam Hamzah, 2013). Sementara definisi lainnya tentang efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkatan keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Komaruddin,1994). Pada dasarnya dalam memaknai efektivitas setiap orang dapat memberi arti yang berbeda sesuai sudut pandang dan kepentingan masing-masing.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan di dalam suatu program kegiatan. Suatu program dikatakan efektif apabila tujuan tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, bahwa untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi perlu mempertimbangkan sasaran dan mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dapat

dikatakan, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan sasaran maupun tujuan. Selanjutnya Steers mengemukakan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya (Steers, 1985). Definisi lain tentang efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi pada suatu organisasi tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Kurniawan, 2005).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa:“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Kegiatan mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Sumber daya yang

dimaksudkan disini meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

D. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program dapat dilihat dari berbagai dimensi tergantung siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Kriteria atau ukuran tingkat efektivitas dalam mencapai tujuan adalah sebagai berikut (S.P. Siagian, 2001).

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai;
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi;
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi

yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional;

4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan;
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja;
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi;
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya; dan
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan (Martani dan Lubis, 1987):

1. Pendekatan sumber (*resources approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya,

baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya dalam mencapai tujuan yang dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodenya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah *descriptive research* yang bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis keefektifan Program Indonesia Pintar (PIP) di daerah kunker Presiden RI yang telah berjalan saat ini serta bagaimana manfaat penggunaan KIP tersebut. Jenis penelitian ini bersifat evaluatif, yaitu mengkaji pelaksanaan KIP ATM di daerah Kunker untuk memperoleh masukan guna menyempurnakan program PIPATM yang lebih efektif di masa depan. Evaluasi kebijakan menggali data dan informasi yang dapat dipergunakan untuk menganalisis kebijakan dan menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan yang diperlukan agar implementasi kebijakan berjalan efektif (Suharto, 2006).

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam studi ini adalah siswa di seluruh tingkat satuan pendidikan yang menerima dana bantuan siswa dari pemerintah pusat dalam bentuk KIP ATM di wilayah Kunker Presiden Republik Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa di satuan pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK serta Paket A,B,C di kabupaten/kota yang terpilih berdasarkan daerah kunjungan kerja Presiden.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposif sampling*. Dasar pengambilan sampel purposif dilakukan dengan pertimbangan bahwa tujuan kajian ini adalah untuk melihat hingga sejauhmana implementasi pelaksanaan KIP ATM di wilayah kunjungan kerja presiden RI. Presiden RI telah menyerahkan kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 47.604 siswa di 39 Kabupaten/Kota. KIP yang dibagikan terdiri KIP ATM 12.860 (27%) dan 34.744 Kartu KIP Reguler (Bukan ATM) (73%) (data per Nopember 2017).

Daerah-daerah yang merupakan kunker Presiden RI tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel3.1 Kab/Kota Penerima KIP Kunjungan Kerja Presiden

No	Kabupaten/ Kota	Provinsi	KIP Non ATM	KIP ATM	Tanggal Penyerahan
1	Kota Pekalongan	Jawa Tengah	257		08-Jan-17
2	Jabodetabek	DKI Jakarta + Jawabarat + Banten	2.846		26-Jan-17
3	Kab. Magelang	Jawa Tengah	1.481		27-Jan-17
4	Kab. Kulon Progo	D.I Yogyakarta	1.558		27-Jan-17

No	Kabupaten/ Kota	Provinsi	KIP Non ATM	KIP ATM	Tanggal Penyerahan
5	Kab. Boyolali	Jawa Tengah	1.133		31-Jan-17
6	Kab. Sleman	D.I Yogyakarta	1.190		04-Feb-17
7	Kota Ambon	Maluku	1.265		09-Feb-17
8	Kab. Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	515		16-Mar-17
9	Kab. Sambas	Kalimantan Barat	439		17-Mar-17
10	Kab. Mempawah	Kalimantan Barat	500		18-Mar-17
11	Kota Batam	Kepulauan Riau	807		23-Mar-17
12	Kab. Tapanuli Tengah	Sumatera Utara	547		24-Mar-17
13	Kab. Mandailing Natal	Sumatera Utara	706		25-Mar-17
14	Kota Bandung	Jawa Barat	1.288		12-Apr-17
15	Kota Cirebon	Jawa Barat	1.227		13-Apr-17
16	Kab. Tanah	Kalimantan	395		7-May-17

No	Kabupaten/ Kota	Provinsi	KIP Non ATM	KIP ATM	Tanggal Penyerahan
	Bumbu	Selatan			
17	Kab. Halmahera Tengah	Maluku Utara	121		8-May-17
18	Kota Jayapura	Papua	392		9-May-17
19	Kab. Wamena	Papua	250		10-May-17
20	Kota Malang	Jawa Timur	1.000		24-May-17
21	Kota Solo	Jawa Tengah	1.857		26-May-17
22	Kab. Malang	Jawa Timur	1.539		03-Jun-17
23	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	1.500		09-Jun-17
24	Kab Ciamis	Jawa Barat	1.257		10-Jun-17
25	Kab Cilacap	Jawa Tengah	3.842		15-Jun-17
26	Kab Banyumas	Jawa Tengah	3.317		16-Jun-17
27	Kab. Banjarnegara	Jawa Tengah	1.230		16-Jun-17
28	Kab. Wonosobo	Jawa Tengah	1.054		17-Jun-17
29	Kab Temanggung	Jawa Tengah	1.231		17-Jun-17

No	Kabupaten/ Kota	Provinsi	KIP Non ATM	KIP ATM	Tanggal Penyerahan
30	Kab Jember	Jawa Timur		1.723	13-Agu-17
31	Kab Sukabumi	Jawa Barat		1.211	31-Agu-17
32	Kab Cimahi	Jawa Barat		1.191	11-Sep-17
33	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan		1.585	
34	Kota. Salatiga	Jawa Tengah		675	
35	Kota Cilegon	Banten		1.170	
36	Kab. Buleleng	Bali		1.000	
Total			34.744	8.555	43.299

Sumber: Dikdasmen, Kemendikbud, 2017

Studi ini akan mengambil 4 daerah sampel yang merupakan daerah kunjungan presiden dengan jenis KIP ATM, yakni Kab. Jember, Kab. Cimahi, Kota Banjarmasin dan Kab. Buleleng.

Pada tingkat Satuan Pendidikan, sekolah akan dipilih secara acak dengan komposisi 2 SD, 2 SMP, 2 SMA, dan 2 SMK serta Paket A,B,C masing-masing diambil 2. Oleh karena sekolah dipilih secara acak, maka status sekolah tidak dipertimbangkan sebagai kriteria dalam pemilihan sekolah. Data jumlah siswa yatim/piatu atau yatim piatu dan miskin pada tingkat provinsi

dan kabupaten/kota didasarkan pada data sasaran siswa penerima dana PIP yang dimiliki oleh Direktorat Pembinaan SD,SMP, Pembinaan SMA, dan Pembinaan SMK serta Dit Paud Dikmas.

Pada setiap sekolah yang terpilih sebagai sampel akan diambil masing- masing 10 siswa penerima KIP ATM. Pengambilan jenis siswa dimaksud untuk memperoleh data tentang aspirasi pendidikan yang diukur dengan keinginan untuk menyelesaikan pendidikan sampai selesai pada satuan pendidikan tertentu dan keinginan untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta pemanfaatan penggunaan dana KIP ATM oleh siswa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data dan belum diolah oleh pihak mana pun. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah *self-administered* kuesioner dan DKT.

Data terkait efektivitas KIP ATM, diperoleh melalui pengisian kuisisioner kepada kepala dinas pendidikan, kepala sekolah, orang tua siswa dan siswa penerima PIP yang ditinjau dari segi a) Penyaluran/Pendistribusian KIP ATM b) Pencairan dana KIP dan; c) Pemanfaatan Dana KIP oleh Siswa. Kuesioner penelitian dibangun dan dirancang dengan struktur pertanyaan tertutup dengan menggunakan *rating scale* dengan skala respon ordinal dan nominal. Skala jawaban adalah rasio

karena secara spesifik menanyakan tentang jumlah penerimaan dan penggunaannya, serta waktu pencairannya.

Selain kuesioner, data diperoleh melalui diskusi kelompok terpumpun (DKT) untuk menggali persepsi kolektif mengenai pelaksanaan dan manfaat KIPATM. Total peserta DKT yang dilaksanakan di setiap kabupaten/kota berjumlah 27 orang, yang terdiri dari 3 orang narasumber pusat, 2 orang dari unsur Dinas Pendidikan, dan 8 orang kepala sekolah dari sekolah yang siswanya penerima KIPATM, 2 orang dari bank penyalur, serta 5 orang tua siswa penerima KIP dan 7 siswa penerima KIP ATM. Berikut adalah rincian jenis dan jumlah peserta DKT di setiap kabupaten/kota lokasi studi.

Tabel 3.2. Daftar Peserta Diskusi Kelompok Terpumpun per Kabupaten/Kota

No	Peserta	Jumlah	Penghubung
1	Perwakilan Dinas Provinsi untuk wilayah Kabupaten/Kota setempat	1	Dinas Pendidikan Provinsi
2	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	1	Dinas Pendidikan Kab/Kota
3	Kepala SD dan SMP Penerima KIP Kunker Presiden (masing-masing 2 orang)	4	Dinas Pendidikan Kab/Kota
4	Kepala SMA dan SMK Penerima KIP Kunker Presiden (masing-	4	Dinas Pendidikan

No	Peserta	Jumlah	Penghubung
	masing 2 orang)		Provinsi
5	Kepala SKB/PKBM Paket A, B, dan C Penerima KIP Kunker Presiden (masing-masing 1 orang)	3	Dinas Pendidikan Kab/Kota
6	Pengelola KIP pada Bank BRI dan BNI setempat (masing-masing 1 orang)	2	Dinas Pendidikan Kab/Kota
7	Peserta didik SD dan SMP Penerima KIP Kunker Presiden (masing-masing 1 orang)*	2	Dinas Pendidikan Kab/Kota
8	Peserta didik SMA dan SMK Penerima KIP Kunker Presiden (masing-masing 1 orang)*	2	Dinas Pendidikan Provinsi
9	Peserta didik SKB/KBM Paket A, B, dan C Penerima KIP Kunker Presiden (masing-masing 1 orang)	3	Dinas Pendidikan Kab/Kota
10	Orangtua/wali siswa SD dan SMP Penerima KIP Kunker Presiden (masing-masing 1 orang)*	2	Dinas Pendidikan Kab/Kota
11	Orangtua/wali siswa SMA dan SMK Penerima KIP Kunker Presiden (masing-masing 1 orang)*	2	Dinas Pendidikan Provinsi

No	Peserta	Jumlah	Penghubung
12	Orangtua/wali siswa Paket B Penerima KIP Kunker Presiden (hanya 1 orang)*	1	Dinas Pendidikan Kab/Kota
	Jumlah	27	

Keterangan:

*) Untuk siswa dan orangtua/wali siswa dari masing-masing jenjang pendidikan, diambil dari **salah satu** sekolah yang diundang

E. Variabel studi

Pada studi ini terdapat tiga variabel yang akan diukur. Pertama adalah penyaluran/distribusi KIP ATM yang diukur dengan kesesuaian antara ketentuan-ketentaun pelaksanaan dengan implementasi dilapangan terhadap Bank Penyalur, Dinas Pendidikan, Sekolah, dan Orang tua.

Variabel kedua adalah pencairan dana KIP ATM yang diukur dengan ketepatan besarnya dana yang dicairkan sesuai ketentuan (total perjenjang dan % jenis penggunaan), waktu pencairan dana, dan prosedur pencairan dana. Variabel ketiga adalah pemanfaatan penggunaan dana KIP ATM berdasarkan pada jumlah dana yang dikelola oleh siswa sendiri.

F. Analisis Data

Data kuantitatif yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan statistika deskriptif. Teknik statistika deskriptif digunakan untuk mentabulasi, menghitung, dan menampilkan distribusi frekuensi untuk setiap item kuesioner dengan format pertanyaan/pernyataan tertutup. Output analisis statistika ini akan menampilkan frekuensi setiap aspek implementasi program PIP ATM. Sementara untuk data kualitatif dianalisis menggunakan *directed content analysis* yaitu peneliti menggunakan kerangka konseptual yang ada (yaitu konsep Program Indonesia Pintar) untuk mengeksplorasi berbagai kendala dan capaian pelaksanaan PIPATM. Analisis kualitatif diarahkan untuk menjawab dua permasalahan PIP yakni: (1) Bagaimanakah ketepatan pelaksanaan PIP (aspek *effectivenss*) berdasarkan penyaluran/pendistribusian KIP ATM dan pencairan dana KIP ATM; (2) Bagaimana pemanfaatan dana KIP oleh siswa.

BAB IV

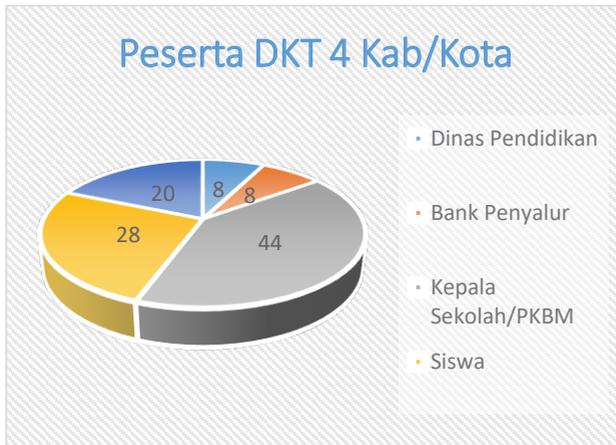
HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan dan pembahasan kajian “Evaluasi Implementasi KIP ATM di Daerah Kunjungan Kerja Presiden RI” berupaya untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam program tersebut. **Pertama**, bagaimana strategi pemerintah, pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melaksanakan pendistribusian KIP ATM ditinjau dari segi Bank Penyalur, Dinas Pendidikan, sekolah, dan orangtua; **Kedua**, bagaimana strategi pencairan KIP ATM ditinjau dari segi ketepatan besarnya dana yang dicairkan sesuai ketentuan, waktu pencairan dan prosedur pencairan; **Ketiga**, efektivitas pemanfaatan kartu KIP ATM oleh siswa ditinjau dari dana bantuan pendidikan PIP (yang digunakan untuk perlengkapan sekolah, berbelanja keperluan belajar di *merchant* yang ditunjuk oleh bank ataupun di koperasi sekolah yang memiliki fasilitas mesin *Electronic Data Capture (EDC)* dan juga terkait dengan dana personal siswa (transport, jajan siswa), lainnya (di luar ketentuan), ketepatan proporsi dana untuk dana bantuan pendidikan PIP dan dana personal siswa, serta kecukupan besaran dana PIP.

A. Profil Responden

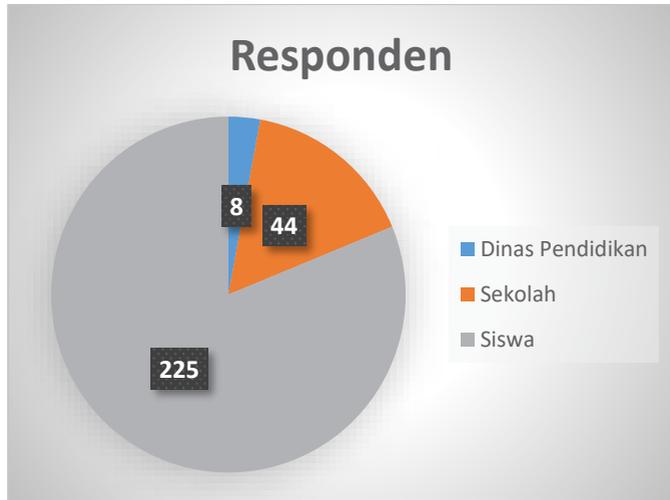
Pelaksanaan diskusi (FGD) diikuti oleh peserta diskusi sebanyak 27 orang per kabupaten/kota dengan jumlah keseluruhan 108 peserta dari 4 kabupaten kota yang menjadi lokasi studi. Jenis responden meliputi perwakilan dari Dinas

Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala sekolah semua jenjang, Bank penyalur (BRI dan BNI), peserta didik dan orang tua/wali dengan rincian dan jumlahnya seperti pada diagram berikut.



Gambar 4.1: Jenis dan Jumlah Peserta DKT di Kab/Kota lokasi studi

Jumlah kuesioner yang sudah terisi ada 277 kuesioner yang disebar di empat kabupaten/kota lokasi kunker Presiden yang membagikan dana PIP dengan fasilitas KIP-ATM. Kuesioner tersebut dibagikan kepada kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, kepala sekolah dan pimpinan SKB/PKBM, serta peserta didik. Persebaran jumlah responden dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut.



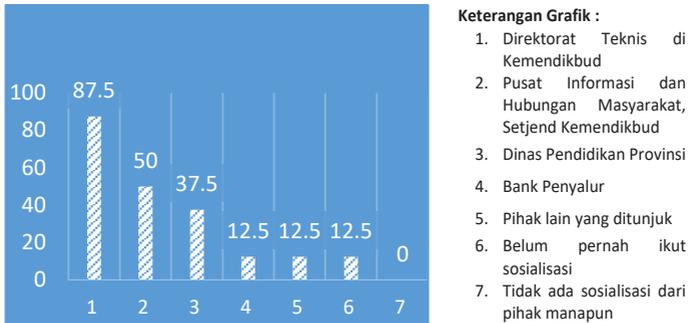
Gambar 4.2: Jenis dan Jumlah Responden

B. Penyaluran KIP ATM

Secara umum, implementasi KIP ATM di daerah kunker Presiden terlaksana dengan baik yang dimulai dari tahapan sosialisasi, distribusi dan pemanfaatan dana sehingga mencapai sasaran yang direncanakan. Model KIP ATM dinilai lebih praktis, tanpa prosedur pencairan yang rumit, kepala sekolah tidak direpotkan, siswa dapat mengambil dana secara utuh, sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima. Umumnya para siswa yang seluruhnya diundang dalam kunjungan presiden merasa sangat senang karena langsung berjumpa dan menerima ATM yang langsung bisa dicairkan saat itu juga dan dapat dibelanjakan untuk keperluan sekolah. Namun, ada beberapa temuan yang perlu untuk pembenahan, antara lain terkait dengan sasaran siswa,

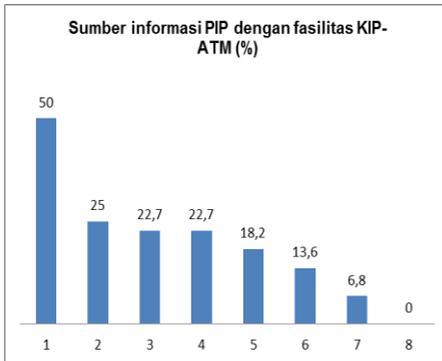
pemanfaatan dana PIP dan sistem/ pelayanan belanja keperluan siswa. Terkait dengan sasaran siswa penerima dana PIP, ditemukan ada beberapa peserta didik yang tidak dapat ditemukan/ teridentifikasi sesuai SK penerima KIP ATM. Sebagai contoh dari hasil penelusuran petugas BRI di daerah Banjarmasin ditemukan paling kurang ada 7 peserta didik yang tidak bisa teridentifikasi/tidak ditemukan, sehingga KIP ATM tidak bisa diserahkan. Tercatat terdapat 4 siswa telah lulus sekolah dan 2 siswa pindah (siswa SMA dan SMK) serta ada beberapa peserta didik program kesetaraan (Paket B dan Paket C) yang tidak mau sekolah lagi dan menolak menerima KIP ATM. Oleh sebab itu pembagian KIP ATM yang seharusnya diberikan pada H-1 saat Kunker Presiden tidak dapat dilakukan terhadap peserta didik tersebut. Oleh sebab itu ada beberapa ATM yang tidak dapat terdistribusi dan masih berada di bank penyalur.

Informasi tentang kunjungan kerja Presiden diperoleh secara berjenjang, dimulai dari Dinas Pendidikan mendapatkan informasi dari Kementerian, kemudian mereka meneruskannya keseluruh sekolah. Pada saat menjelang kunker Presiden, sekolah juga melakukan sosialisasi kepada siswa. Grafik berikut menjelaskan sumber informasi yang diperoleh terkait sosialisasi KIP ATM.



Grafik 4. 1: Informasi Sosialisasi KIP ATM (%)

Responden Dinas Pendidikan menyatakan bahwa Informasi yang diperoleh terkait dengan sosialisasi pelaksanaan pembagian KIP-ATM dilakukan oleh Direktorat Teknis Kemendikbud (87,5 %).Ini mengindikasikan bahwa Dit.Kemendikbud sudah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan sehingga program bisa terlaksana saat kunker Presiden di laksanakan.Pihak sekolah maupun dinas pendidikan serta bank penyalur sudah tahu apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan menjelang kunker Presiden. Bahkan dari hasil DKT, peserta diskusi dengan antusiasnya menceritakan bahwa sebelum hari H-kunker tersebut semua guru yang siswanya mendapatkan KIP ATM sangat sibuk membantu mempersiapkan segala perlengkapan administrasi yang diperlukan setelah mendapatkan arahan/informasi tentang KIP ATM di kunker Presiden RI.

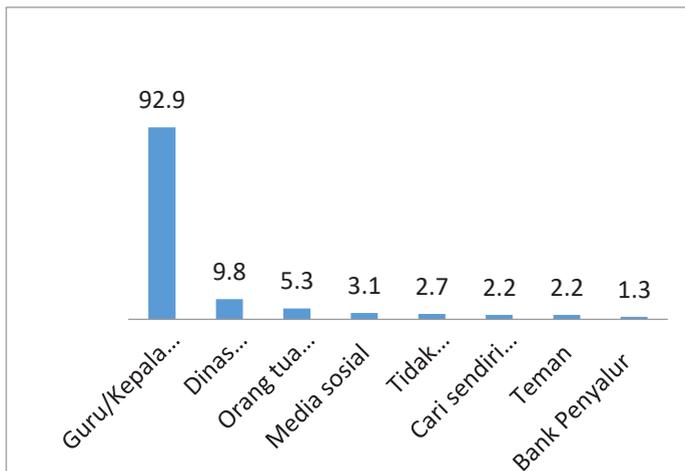


Keterangan Grafik :

- 1 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- 2 Bank Penyalur
- 3 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Kemendikbud
- 4 Media Sosial
- 5 Dinas Pendidikan Provinsi
- 6 Media Cetak (koran, majalah, dll)
- 7 Salah Satu Direktorat Teknis di Kemendikbud
- 8 Sekretariat Jenderal Kemendikbud

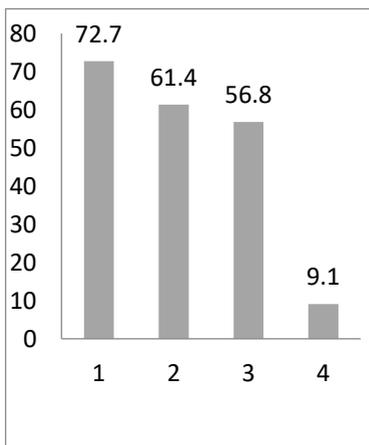
Grafik 4.2: Sumber Informasi (%)

Informasi sosialisasi KIP ATM sebelum pelaksanaan kunker juga disampaikan ke sekolah. Hal ini dikatakan oleh responden kepala sekolah yang menyatakan bahwa informasi didapat dari Dinas Pendidikan (50%) kemudian disusul Bank Penyalur (25%).



Grafik 4.3: Sumber Informasi (%)

Begitu pula dengan responden siswa menyatakan bahwa Informasi yang mereka dapatkan berasal dari guru/kepala sekolah (92.9%). Kepala sekolah mengundang orangtua siswa penerima KIP untuk memberikan pemahaman tentang tujuan dan manfaat KIP ATM, peran sekolah/satuan pendidikan yang siswanya menerima KIP ATM, tata cara dan prosedur untuk mengambil ATM di Bank, Pemanfaatan dana bantuan PIP, serta tentang kunker presiden Jokowi yang mewajibkan semua anak penerima KIP ATM datang menyambutnya dengan persiapan yang diperlukan.



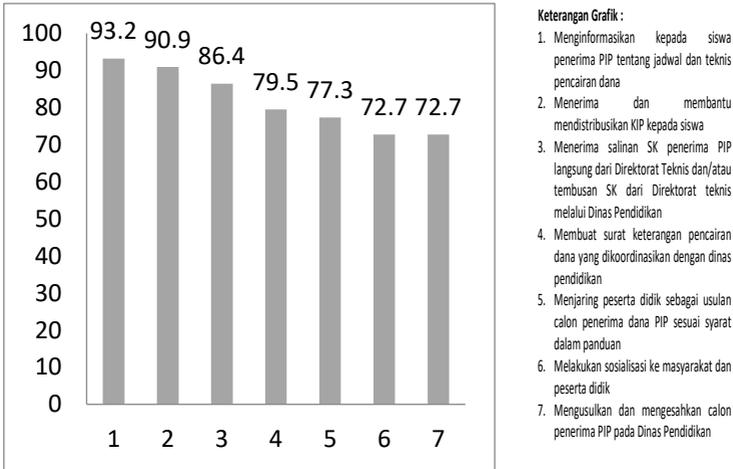
Keterangan Grafik :

- 1 Membantu pihak sekolah dalam memverifikasi siswa yang diusulkan menerima PIP
- 2 Sebagai tim pendataan dan penjarangan siswa miskin di sekolah
- 3 Dimintai usulan, saran, persetujuan terkait pendataan usulan
- 4 Tidak berperan

Grafik 4.4. Keterlibatan Disdik dalam Pendataan ulang usulan Penerima KIP dalam Dapodik

Terkait dengan keterlibatan Dinas Pendidikan, sekolah menginformasikan bahwa Disdik membantu pihak sekolah dalam pendataan ulang usulan PIP dalam Dapodik. Dalam hal

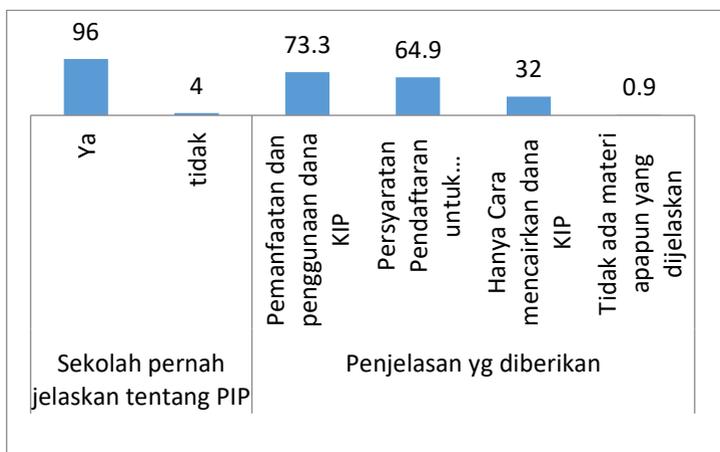
ini penentuan siswa penerima KIP ATM dilakukan oleh Direktorat Kemdikbud berdasarkan data dapodik, selanjutnya diinformasikan ke Disdik dan sekolah serta bank penyalur.



Grafik 4.5. Tugas Sekolah Menjelang Kunker

Dari Grafik 4.5 distribusi KIP ATM sebelum pelaksanaan kunker Presiden melibatkan pihak-pihak yang terkait, diantaranya sekolah yang siswanya penerima KIP ATM. Tugas sekolah tersebut adalah menginformasikan kepada siswa penerima PIP (93.2%) serta ikut membantu bersama bank penyalur untuk mendistribusikan KIP kepada siswa (90.9%) dan juga menerima salinan SK penerima PIP langsung dari Direktorat Teknis dan/atau tembusan SK dari Direktorat teknis melalui Dinas Pendidikan. Pernyataan tersebut juga didukung dari hasil isian kuesioner yang ditanyakan kepada responden siswa yang menyatakan bahwa sekolah memberikan penjelasan terkait program PIP (96%). Informasi

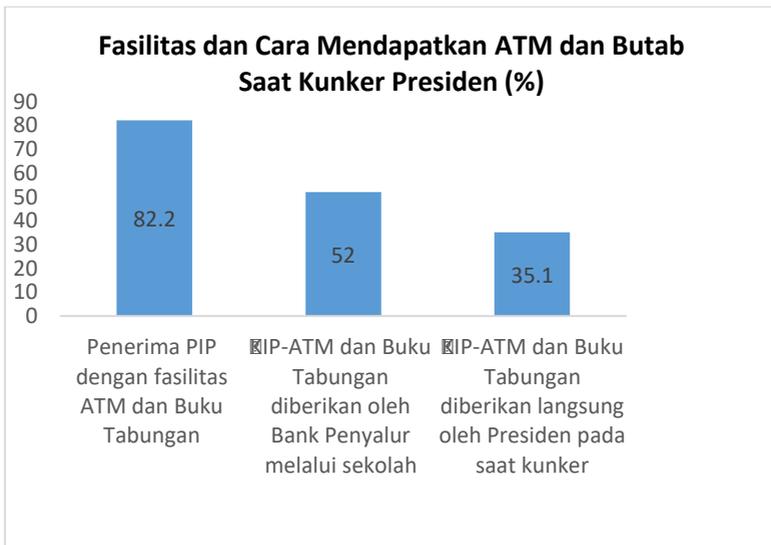
yang diberikan adalah penggunaan, pemanfaatan, persyaratan untuk mendapatkan KIP serta mencairkan dana KIP. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik 4.6 berikut.



Grafik 4. 6: Penjelasan Tentang PIP oleh Sekolah (%)

Pada saat kunjungan Presiden semua penerima KIP ATM datang menghadiri acara kunker Presiden tersebut dan membawa serta ATM-nya. Secara simbolis Presiden membagikan kartu KIP ATM kepada beberapa anak yang mewakili siswa SMA, SMK, SMP,SD dan siswa yang mengikuti pendidikan pada program kesetaraan. Umumnya siswa yang seluruhnya diundang dalam kunjungan Presiden merasa sangat senang karena langsung berjumpa dan menerima ATM yang langsung bisa dicairkan saat itu juga dan dapat dibelanjakan untuk keperluan sekolah.

Beberapa dari siswa penerima KIP ATM ada yang mengatakan bahwa mereka menerima kartu KIP ATM dan buku tabungan tidak langsung dari Presiden, namun didapatkan dari bank penyalur sehari setelah acara kunker Presiden. Berikut adalah grafik yang menjelaskan cara mereka mendapatkan KIP ATM dan buku tabungan.



Grafik 4.7: Fasilitas dan Cara Mendapatkan ATM dan Butab

Berdasarkan Grafik 4.7, siswa penerima PIP menyatakan bahwa mereka menerima kartu ATM dan juga buku tabungan (82,2%).Sebesar 52% dari mereka menyatakan bahwa Buku Tabungan dan ATM diberikan oleh bank penyalur melalui sekolah dan sebesar 35,1% diberikan langsung saat kunker. Untuk kendala dalam mendapatkan KIP ATM tidak terdapat kendala hanya berbeda waktunya saja. Bagi yang telah mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM, mereka sudah

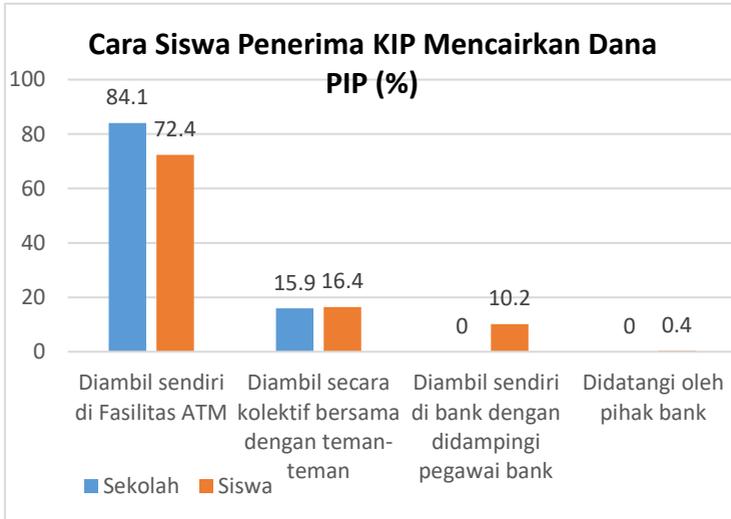
langsung bisa mencairkan uangnya pada saat kunker Presiden tersebut.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dalam penyaluran KIP ATM yang dimulai dari tahapan penyampaian informasi, pemberian sosialisasi dan distribusi dengan fasilitas KIP ATM yang dibagikan saat kunjungan kerja Presiden sudah berjalan dengan baik. Alur penyampaian informasi dan sosialisasi KIP ATM tersebut dimulai dari atas yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui direktorat teknis kemudian disampaikan ke dinas pendidikan, lalu dinas pendidikan meneruskannya ke setiap kepala sekolah dan kemudian disampaikan kepada seluruh siswa yang terdaftar sebagai penerima KIP ATM di kunker Presiden Republik Indonesia. Distribusi KIP ATM saat kunker juga terlaksana dengan lancar, seperti yang diungkapkan oleh peserta diskusi bahwa kunker Presiden menjadikan pemicu yang baik bagi dinas pendidikan, sekolah dan juga Bank Penyalur untuk mensukseskan pelaksanaan pemberian KIP ATM dan juga ingin memberikan yang terbaik sehingga distribusi KIP ATM menjadi tuntas. Di beberapa lokasi studi seperti siswa langsung menerima KIP ATM dan langsung bisa dicairkan melalui ATM yang memang disediakan ditempat kunker Presiden dilaksanakan.

C. Pencairan KIP ATM

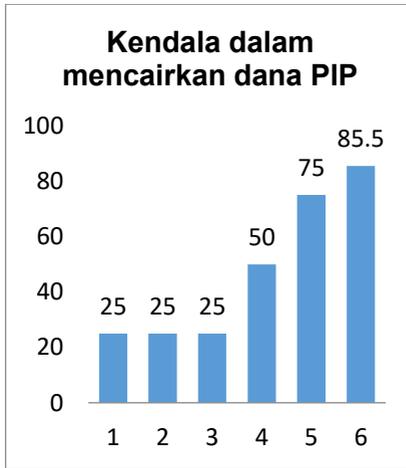
Pencairan dana KIP ATM umumnya dianggap mudah, sehingga sebagian besar siswa mencairkan dana KIP mereka dengan cara diambil sendiri menggunakan fasilitas mesin ATM, namun demikian ada juga yang diambil secara kolektif,

diambil sendiri ke bank dan bank yang mendatangi mereka ke sekolah karena belum bisa mengoperasikan mesin ATM terutama pada siswa SD.



Grafik 4.8: Cara Mencairkan Dana PIP

Berdasarkan Grafik 4.8, terlihat bahwa rata-rata siswa sudah menggunakan fasilitas Kartu ATM untuk mengambil dana PIP di ATM baik informasi dari siswa (72.4%) maupun pihak sekolah (84.2%).



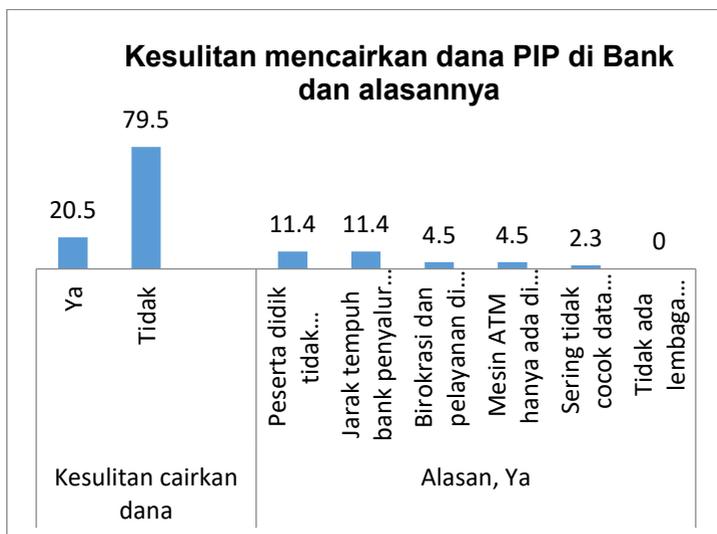
Keterangan Grafik :

1. Siswa tidak tahu cara menggunakan mesin ATM
2. Jarak tempuh bank/lembaga penyalur/mesin ATM yang sangat jauh
3. Sering tidak cocok data penerima dengan data di bank
4. Birokrasi dan pelayanan di bank/lembaga penyalur yang susah
5. Tidak ada kesulitan
6. Masih Sedikitnya mesin ATM

Grafik 4.9: Kendala dalam Pencairan Dana PIP

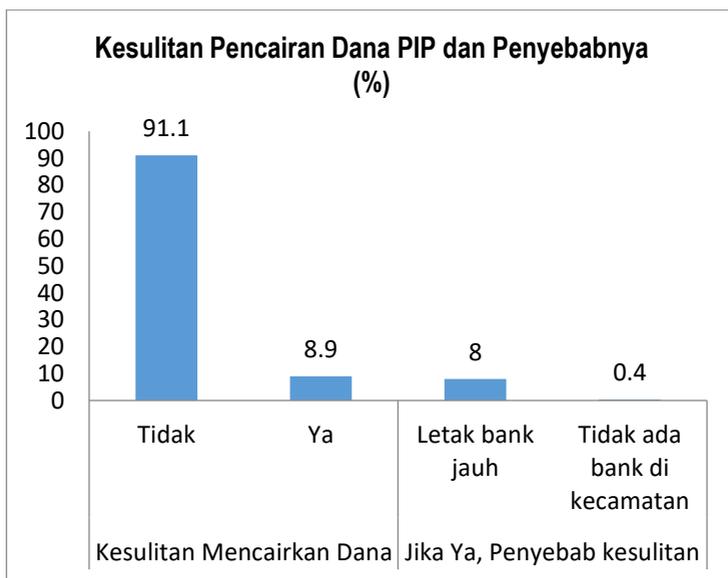
Kendala utama yang dihadapi dalam pencairandana PIP dengan fasilitas KIP ATM adalah masih sedikitnya mesin ATM (85.5%), Birokrasi dan pelayanan bank/Lembaga penyalur (50%), namun bila mesin ATM tersebut banyak tersedia di wilayah mereka secara teknis tidak mengalami kendala (75%), terutama dalam mengoperasikannya, sehingga pencairan dapat dilakukan. Meski mudah dalam pencairan dana tapi dalam persyaratan yang sudah ditentukan mereka harus tetap perlu melengkapinya pada saat mengambil ATM dan buku rekening dari Bank. Setiap peserta didik harus menyiapkan Kartu Keluarga, KTP orangtua/wali, Kartu Siswa dan rekomendasi dari sekolah/PKBM. Bagi beberapa siswa miskin memperoleh kendala dalam pemenuhan persyaratan administrasi seperti kartu keluarga dan KTP orang tua/wali. Kesulitan ini dikarenakan adanya beberapa alasan diantaranya, siswa penerima KIP ATM tidak semuanya anak

yatim/piatu/yatim piatu, meski sasaran penerima dana PIP kunker tsb diperuntukan/diprioritaskan bagianak yatim/piatu/yatim piatu. Siswa penerima KIP ATM yang masih mempunyaorang tua tersebut bekerja menjadi TKI di negara lain, sehingga siswa kesulitan untuk memenuhi persyaratan KTP orangtuanya, akibatnya mengalami kesuitan dalam memperoleh kartu ATM/buku rekening. Hal ini terjadidibeberapa lokasi studi seperti di kabupaten Malang.



Grafik 4.10: Kesulitan Pencairan Dana PIP di Bank dan Alasannya

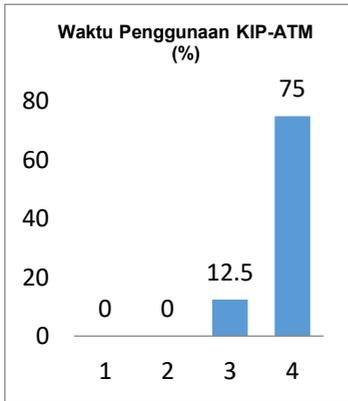
Berikutnya beberapa alasan yang dikemukakan oleh responden terkait dengan kesulitan dalam mencairkan dana di Bank penyalur yaitu ada sebanyak 20.5% menyatakan ada kesulitan dengan alasan (1) jarak tempuh (2) informasi yang tidak jelas tentang tata cara pencairan. Selebihnya 79.5% responden siswa menyatakan bahwa tidak ada kesulitan dalam mencairkan dana manfaat.



Grafik4.11: Alasan Kesulitan dalam Pencairan Dana PIP

Berbeda halnya dengan responden Dinas Pendidikan, bila dilihat dari grafik 4.11, hampir seluruh siswa tidak merasakan kesulitan dalam pencairan dana PIP, hanya 8,9% siswa saja yang mengalami kesulitan dengan alasan letak bank jauh dari sekolah dan tempat tinggal mereka. Meski hasil kajian ini

masih menunjukkan adanya kesulitan dalam pencairan dana PIP dengan fasilitas KIP ATM tersebut, namun dari segi ketepatan waktu penggunaan KIP ATM tampaknya menunjukkan hasil yang baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut.



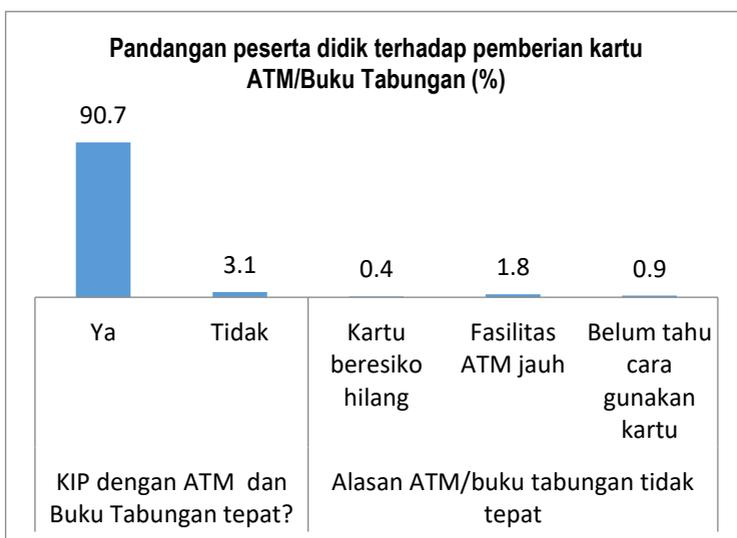
Keterangan Grafik :

1. Satu hari sebelum kunjungan kerja Presiden
2. Satu hari setelah pemberian KIP oleh Presiden
3. Menunggu beberapa hari untuk di-link-kan ke sistem pihak bank cabang daerah
4. Langsung dapat digunakan pada saat kunjungan Presiden

Grafik 4.12: Waktu Penggunaan KIP ATM

Dari grafik 4.12 terlihat bahwa 75% responden siswa menyatakan bahwa mereka langsung bisa menggunakan KIP ATM ini setelah acara kunker Presiden. Peserta diskusi juga menyampaikan hal yang sama, bahwa dua jam setelah penyerahan KIP ATM di acara kunker Presiden, KIP ATM sudah bisa digesek di mesin ATM nya sehingga dana PIP tunai bisa langsung di belanjakan keperluan sekolah. Hal ini berarti terlihat efektivitas waktu disini meskipun masih ada yang menunggu beberapa hari untuk di-link-kan ke sistem pihak cabang dan daerah, namun kasus itu sangat kecil jika dibandingkan dengan yang bisa langsung digunakan.

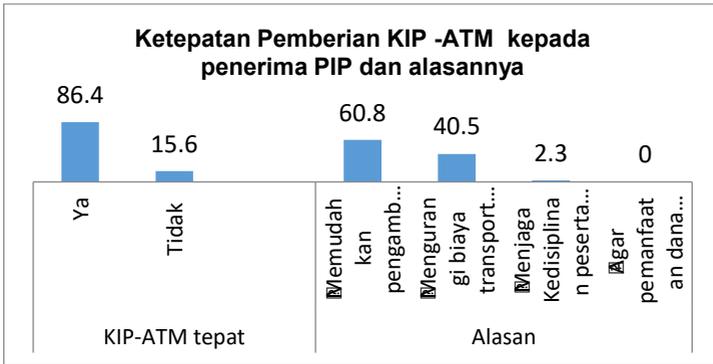
Pandangan peserta didik terkait dengan pemberian/penggunaan KIP ATM dan butabnya memberikan nilai yang positif, karena hampir semua yaitu 90.7 % responden siswa menyatakan bahwa sudah tepat mereka mendapatkan KIP ATM dan Buku Tabungan, meski ada juga /sebagian kecil yang menyatakan tidak tepat (3,1%) dengan alasan fasilitas ATM yang jauh, resiko hilang kartu dan ada juga yang belum tahu menggunakan kartu ATM.



Grafik 4.13: Pendapat Siswa Tentang KIP ATM dan Butab

Selain itu menurut responden Kepala Sekolah, pemberian penggunaan fasilitas KIP ATM sangat tepat (86,4%). Berbagai alasan yang dikemukakan antara lain: memudahkan pengambilan/pencairan dana (60,8%), mengurangi biaya transport peserta didik (40,5%), dan menjaga kedisiplinan

peserta didik (2,3%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik 4.14.



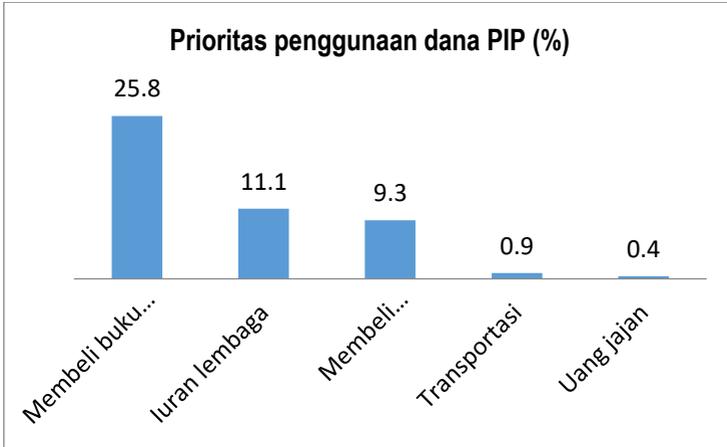
Grafik 4.14: Pendapat Kepsek Tentang KIP ATM dan Butab

Pendistribusian KIP ATM di kunker Presiden ini tentu saja memerlukan adanya koordinasi yang baik dari semua pihak yang terlibat seperti Bank Penyalur, Disdik, dan Kepala Sekolah/pengelola PKBM. Hal ini tentu sangat penting, mengingat waktu yang diberikan sangat terbatas sebelum pelaksanaan hari H nya kunker Presiden untuk mengetahui keberadaan anak penerima KIP ATM serta meneliti kelengkapan persyaratan pengambilan KIP ATM dan buku tabungannya di Bank. Sehingga permasalahan yang timbul seperti adanya beberapa siswa penerima KIP yang sudah lulus, pindah, atau tidak mau sekolah lagi segera bisa di ketahui dengan cepat, dan dicarikan solusinya.

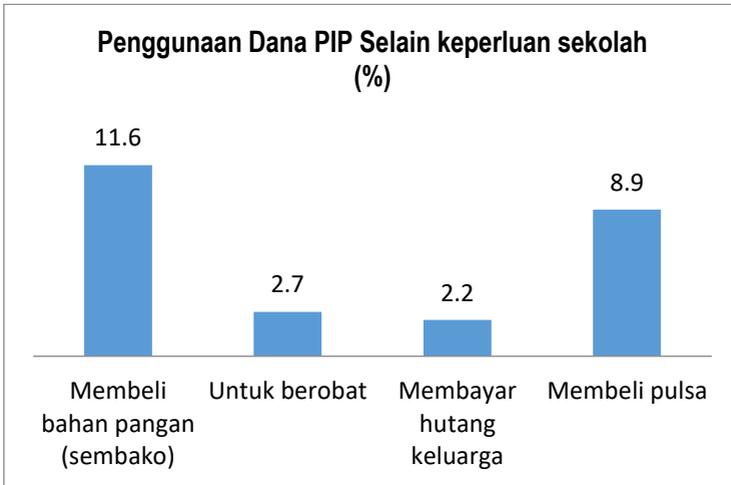
D. Pemanfaatan KIP ATM

Hal yang paling utama dalam program ini adalah azas kebermanfaatannya, dimana program ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat terutama peserta didik sehingga dapat membantu membeli kebutuhan sekolah mereka.

Secara keseluruhan dana KIP ATM yang diterima siswa dirasakan dapat mengatasi kebutuhan biaya personal siswa. Hal ini dapat dilihat dari besarnya penggunaan dana KIP pada kebutuhan personal siswa seperti membeli buku dan alat-alat pelajaran. Selain itu juga digunakan untuk biaya lembaga/ekstrakurikuler, membeli sepatu, tas, dan seragam sekolah, serta untuk uang transportasi ke sekolah. Namun demikian ternyata masih ditemukan adanya penyimpangan pemanfaatan dana PIP seperti tampak pada Grafik 4.15, digunakan untuk membeli sembako(11,6%), berobat(2,7%), bayar hutang (2,2%),serta membeli pulsa.Pada Grafik 4.15, menunjukkan prioritas penggunaan dana PIP, prosentaseyang menggunakan dana untuk membeli buku, alat tulis dan bahan belajar lainnya sebanyak 25,8%, iuran lembaga (11,1%), membeli sepatu tas dan seragam sekolah (9,3%), dan selebihnya untuk transportasi ke sekolah dan uang jajan.



Grafik 4.15: Prioritas Penggunaan Dana PIP



Grafik 4.16: Penggunaan Dana PIP Selain untuk Keperluan Sekolah

Terkait dampak positif dari pemberian dana PIP dapat dirasakan langsung oleh sekolah dan siswa, yaitu diantaranya mencegah siswa DO karena keterbatasan ekonomi keluarga (84%), membantu meringankan BOP pendidikan (27,3%) terutama di program pendidikan kesetaraan, dan juga dapat meringankan biaya sekolah siswa dan memotivasi siswa agar lebih rajin belajar (lihat Grafik 4.17). Di lain pihak, orangtua siswa pada saat diskusi juga menyatakan merasa sangat terbantu dengan PIP fasilitas KIP ATM ini, yang pencairannya relatif lebih mudah dan jumlah yang diterima juga utuh sehingga dapat dipakai untuk membeli peralatan sekolah dan pakaian maupun untuk biaya transport dan uang jajan siswa.

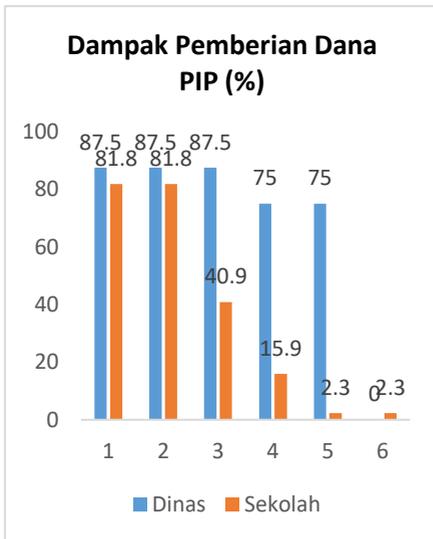


Keterangan Grafik :

1. Mencegah siswa untuk DO
2. Membantu meringankan BOP pendidikan
3. Tugas sekolah menjadi lebih ringan
4. Koperasi sekolah menjadi aktif dan produktif
5. Tidak ada manfaatnya/dampaknya
6. Guru menjadi lebih semangat mengajar
7. Kesejahteraan guru ikut meningkat
8. Kesejahteraan pengelola ikut meningkat
9. Meningkatkan motivasi siswa
10. Meningkatkan kerapihan siswa

Grafik 4.17: Dampak Positif dari PIP (Resp.Sekolah)

Dampak positif juga disampaikan oleh Dinas Pendidikan bahwa ada peningkatan motivasi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan dan meringankan biaya peserta didik, di samping itu siswa juga menjadi lebih rajin untuk hadir di tempat belajar, motivasi mengerjakan tugas, patuh dan disiplin dengan jumlah prosentase rata-rata 97% kemudian disusul tentang pengembangan bakat serta menjadi lebih terampil.



Keterangan Grafik :

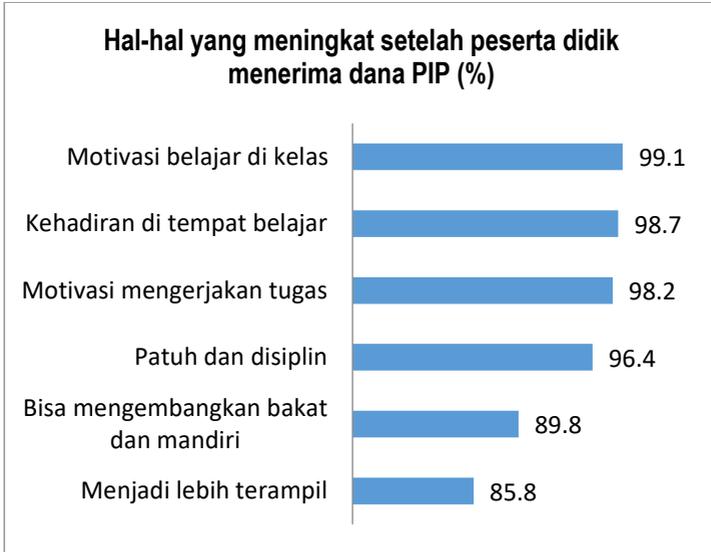
1. Meningkatnya motivasi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan
2. Meringankan biaya pendidikan peserta didik
3. Meningkatkan minat bersekolah (ATS) dengan disiplin
4. Menunjukkan kepribadian terpuji dan tidak tercela
5. Menambah uang saku dan biaya lainnya
6. Tidak ada manfaatnya

Grafik 4.18: Dampak Positif PIP (Resp Disdik)

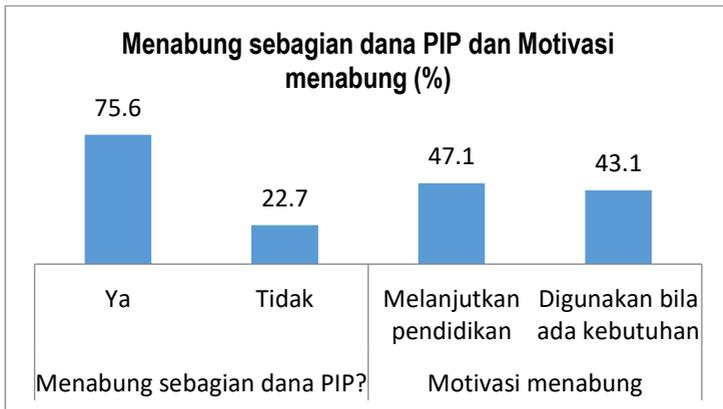


Grafik 4.19: Peningkatan Motivasi, Disiplin, dan Kehadiran Siswa (Resp Disdik)

Siswa juga menyatakan banyak manfaat atau dampak positif yang dirasakannya setelah menerima dana PIP, yaitu motivasi belajar, kehadiran ditempat belajar/kerajinan, motivasi mengerjakan tugas, patuh dan disiplin terhadap guru dan peraturan sekolah, bisa mengembangkan bakat dan melatih kemandirian mereka serta menjadi lebih terampil karena giat berlatih. Dampak positif lain adalah membiasakan atau melatih siswa untuk menabung, seperti tergambar dalam grafik4.21.

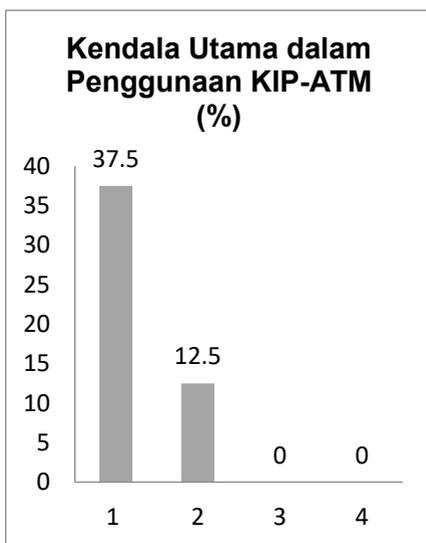


Grafik 4.20: Peningkatan Motivasi, Disiplin, dan Kehadiran Siswa(Resp Siswa)



Grafik 4.21: Motivasi Menabung Dana PIP

Meskipun banyak mempunyai dampak positif dan dinilai sudah tepat penggunaannya, menurut Dinas Pendidikan penyaluran dana PIP dengan fasilitas KIP ATM menimbulkan beberapa kendala utama, diantaranya yaitu KIP-ATM rentan disalahgunakan dan masih banyaknya pemegang atau penerima yang belum memahami cara menggunakan mesin ATM. Sehingga pihak sekolah tetap harus berusaha untuk mengarahkan siswa dalam menggunakan dana tersebut sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan sekolah.



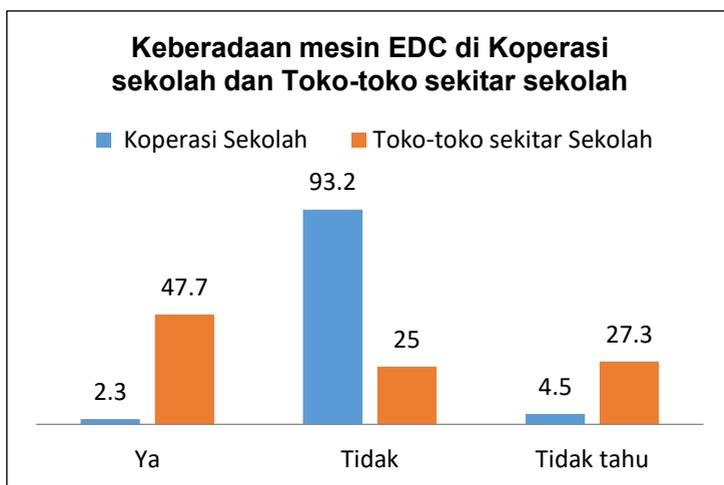
Keterangan Gambar:

1. KIP-ATM rentan disalahgunakan
2. Belum memahami cara menggunakan mesin ATM
3. KIP-ATM berisiko hilang
4. Jaringan ATM di daerah saya rata-rata jaraknya lebih dari 5 Km dari pemukiman

Grafik 4.22 Kendala Dalam Penggunaan KIP ATM

Selain dari dampak positif tersebut, informasi yang baik juga dikemukakan oleh responden siswa yaitu sekitar 75.6% responden siswa menyatakan bahwa mereka juga menabung

sebagian dana PIP dengan pertimbangan untuk melanjutkan Pendidikan, dan akan digunakan bila ada kebutuhan. Namun demikian, untuk pemanfaatan dana KIP ATM para peserta penerima dana membelanjakan dananya secara bebas dimana saja yang mereka inginkan di semua toko-toko yang ada. Hal ini dikarenakan masih kurangnya ketersediaan mesin EDC untuk melakukan transaksi non tunai baik di kopersai sekolah maupun di toko-toko sekitar, seperti tampak dinyatakan pada grafik berikut.



Grafik 4.23: Keberadaan Mesin EDC

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa untuk pencairan dana secara keseluruhan hampir semua siswa sudah mencairkan dananya, baik ditarik oleh siswa sendiri maupun didampingi oleh orangtua maupun pihak sekolah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKAN

A. SIMPULAN

A.1. STRATEGI PENYALURAN/DISTRIBUSI KIP ATM

- a. Implementasi KIP ATM (Plus) di daerah kunker Presiden umumnya terlaksana dengan baik dari tahapan sosialisasi, distribusi dan pemanfaatan dana, sehingga dapat mencapai sasaran yang direncanakan.
- b. Sosialisasi dan distribusi KIP ATM dilaksanakan di daerah kunker berjalan dengan baik. Pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait melakukan persiapan untuk penyambutan kunker Presiden RI. Materi sosialisasi antara lain tentang: KIP ATM, tujuan dan manfaat KIP ATM, peran sekolah/satuan pendidikan yang siswanya menerima KIP ATM, koordinasi sekolah-siswa-bank penyalur, prosedur penggunaan KIP ATM, pemanfaatan dana bantuan PIP, serta penyambutan siswa, guru, dan pihak terkait dalam kunker Presiden Jokowi.
- c. Distribusi KIP ATM relatif dapat dilakukan oleh Bank penyalur bekerjasama dengan sekolah, lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan, meski ada beberapa yang belum terdistribusi di lokasi studi karena tidak ditemukan lagi siswa penerima dana PIP tersebut.

A.2. STRATEGI PENCAIRAN KIP ATM

- a. Pencairan dana KIP ATM umumnya dianggap mudah dan cepat, terutama siswa SMP,SMA/SMK, Paket B dan Paket C sudah dapat menggunakan sendiri ATMnya untuk mengambil uang. Sedangkan anak-anak SD dan beberapa anak SMP masih dibantu orangtuanya/ sekolah untuk mencairkan dana.
- b. Model KIP ATM dinilai lebih praktis, tanpa prosedur pencairan yang rumit, Kepala sekolah tidak direpotkan, siswa dapat mengambil dana secara utuh, sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima.
- c. Semua dana manfaat PIP seluruhnya dapat diambil tanpa ada potongan administrasi dari Bank maupun pihak lain. Rata-rata siswa melakukan penarikan sekaligus tanpa menyalurkan dana di saldo buku tabungan, namun ada beberapa yang menyalurkan untuk di tabung,diperkirakan, hanya 10% dari jumlah yang diterima. Pencairan tanpa sisa saldo ini terjadi karenaBank penyalur (BNI maupun BRI) belum memberlakukan ketentuan dan sistem pembatasan penarikan uang bagi siswa.

A.3. EFEKTIFITAS PEMANFAATAN KIP ATM

- a. Orangtua dan siswa merasa sangat terbantu oleh adanya bantuan dana PIP, khususnya untuk membeli peralatan sekolah dan pakaian maupun

untuk biaya transport dan uang jajan siswa. Terlebih dapat melakukan penarikan secara langsung di ATM.

- b. Pemanfaatan dana PIP, umumnya tidak dapat dipantau baik oleh sekolah maupun pihak lain yang terkait karena dana PIP langsung diambil oleh siswa/orangtua siswa dan dibelanjakan langsung di toko. Sebagian besar pihak sekolah meyakini bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan sekolah. Terdapat juga beberapa temuan dimanfaatkan untuk keperluan keluarga (beli sembako, bayar utang, berobat) namun tidak signifikan.
- c. Terdapat perubahan perilaku positif setelah siswa menerima manfaat dana PIP meliputi kehadiran siswa, motivasi belajar dan motivasi untuk melanjutkan sekolah.

B. SARAN KEBIJAKAN

B.1. Strategi Penyaluran / Pendistribusian KIP ATM

- a. Pendistribusian KIP melalui ATM dinilai sangat efektif terbukti implementasinya terlaksana dengan baik dari tahapan sosialisasi, distribusi dan pemanfaatan dana, sehingga dapat mencapai sasaran yang direncanakan. Evaluasi terhadap daerah yang telah melaksanakan KIP ATM harus terus dilakukan agar bisa menjadi best practice bagi daerah lain yang belum mendapatkan KIP ATM.

- b. Kebijakan ini perlu dilanjutkan mengingat hasil yang dilaksanakan memberikan manfaat positif yang dirasakan berbagai pihak. Namun demikian proses update pendataan dan sinkronisasi data harus terus dilakukan agar seluruh siswa miskin yang memang berhak, terutama siswa dari yatim piatu yang tinggal di panti-panti asuhan dapat menerima dana PIP.

B.2. Strategi Pencairan Dana KIP

- a. Pencairan dana KIP ATM umumnya dianggap mudah dan cepat, terutama siswa SMP, SMA/SMK dan Paket B dan Paket C sudah dapat menggunakan sendiri ATMnya untuk mengambil uang. Namun untuk anak-anak SD dan beberapa anak SMP sebaiknya perlu dibantu orangtuanya/sekolah untuk mencairkan dana.
- b. Kebijakan dengan menggunakan KIP ATM segera diberlakukan secara keseluruhan, karena model KIP ATM dinilai lebih praktis, tanpa prosedur pencairan yang rumit, kepala sekolah tidak direpotkan, siswa dapat mengambil dana secara utuh, sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima.

B.3. Pemanfaatan Dana PIP

- a. Pembinaan dari sekolah/dinas/pemerintah kepada siswa/orangtua penerima yang sudah berjalan harus terus dilaksanakan mengingat ini bagian dari sistem pengawasan/monitor yang

proporsional terhadap pemanfaatan dana PIP untuk mencegah penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukannya melalui pembinaan sekolah.

- b. Pemerintah daerah/Bank Penyalur/Sekolah yang mempunyai potensi perlu mulai membangun kerjasama dengan tempat perbelanjaan baik itu toko dan koperasi sekolah atau merchant yang mempunyai fasilitas EDC ataupun yang belum agar siswa dapat berbelanja sesuai dengan peruntukannya. Diperlukan kemauan dan inovasi dari pimpinan sekolah, lembaga perbankan dan stakeholder daerah dalam mensukseskan implementasi KIP ATM.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmady, ZA dkk. 1994. Kebijakan Publik Dan Pembangunan, Fakultas Ilmu Administrasi, Malang, UNBRA
- Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan
- Aday, Lu Ann and Andersen, Ronald. 1975. *Development of Indices of Access to Medical Care*. Health Administration Press. Ann Arbor
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2016. Survei Biaya Hidup (SBH). Jakarta : Publikasi BPS.
- Baines, P.R. 1999. *Exploring The Positioning Process in Political Campaigning*, Jurnal of Communication Management, Vol.3 No.3.
- Coleman, Major G. (Spring 2003). *African American popular wisdom versus the qualification question: Is affirmative action merit based?*. Western Journal of Black Studies. 27, 1. 35-44.
- Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2015. Panduan Pelaksanaan PIP. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2017. Rekap Data Pemberian KIP Pada

Kunjungan Kerja Presiden Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2015. Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Indonesia Pintar. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. 2012. Panduan Pelaksanaan tahun 2012 Bantuan Khusus Murid (BKM) Jenjang Pendidikan Menengah (Dekonsentrasi). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Danim, Sudarwan. 2005. Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 2005. Kamus Inggris Indonesia : An English- Indonesian Dictionary. Jakarta: PT Gramedia
- Effendy, Onong Uchjana, 1986. Dimensi Dimensi Komunikasi, Bandung. Remaja Karya CV
- Fientje J.A Oentoe. 2006. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan. Universitas Negeri Manado.
- Gani, Ascorbat, 1981, *Demand for Health services in Rural Area of Karang Anyar Regency, Central Java, Indonesia*, Thesis for Doctor of Public Health, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, 222 hlm

- Hamzah. B. Uno. 2013. *Teori Motivasi dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hemasaputri, Linda. 2010. *Pengaruh Pemanfaatan Dana Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM terhadap Prestasi Belajar Siswa SMA Negeri I Pacitan*. Skripsi, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang.
- Hidayat. 1986. *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Jefkins, Frank, 1992. *Public Relation*, cetakan ke-4. Jakarta. Erlangga
- Kemendikbud. 2015, *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2015 -2019*. Jakarta: Kemendikbud
- Koran Pendidikan. 2013.
<http://headline.koranpendidikan.com/view/3295/pangkas-tuntas-angka-putus-sekolah.html>, 26 Februari 2013
- Komaruddin, 1994, *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi ke-2, Jakarta: Bina Aksara
- Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini. 1987. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*, Jakarta. Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia,
- Mosley, J. Malcolm, 1979. *Accessibility: the Rural Cahalenge*, Methuen & CoLtd, London

- Martani dan Lubis, 1987. Manajemen Modern, Jakarta: Rineka Cipta
- Pusat Data dan statistik Pendidikan, Kemendikbud 2015. Perkembangan APS Tahun 2010/2011 - 2014/2015
- Pusat Penelitian Kebijakan. 2013. Kajian Efektifitas Pemberian Subsidi Siswa. Jakarta. Puslitjak, Balitbang, Kemendikbud
- Pusat Penelitian Kebijakan. 2015. Kajian Implementasi Program Indonesia Pintar. Jakarta. Puslitjak, Balitbang, Kemendikbud
- Postur Anggaran Kemendikbud 2018. Bahan Paparan Mendikbud. Rapat Kerja Kemendikbud dengan Komisi X DPRRI. Tanggal 13 September 2017.
- Suryadi dan Tilaar, 1995. Efisiensi Pendidikan. Jakarta: Pusat Informatik untuk Pengelolaan Pendidikan, Balitbang Depdikbud.
- Steers, M. Richard. 1985. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga
- Siagian, Sondang P. 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta
- Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Rafilka Aditama
- Taufiqurrahman Saleh, 2009. Membangun Pendidikan Indonesia, Jakarta : lembaga pers dan penerbitan PP IPNU

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2012. Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan, Buku Pegangan TKPK Daerah. Jakarta, TNP2K.

KAJIAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) pada hakekatnya merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk memastikan terlaksanakannya program pemerataan pendidikan dan perluasan akses pelayanan pendidikan yang bermutu khususnya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, peluang keberlanjutan sekolah, pengurangan angka putus sekolah, dan peningkatan prestasi.

Pemerintah bertekad melaksanakan seluruh program tersebut melalui percepatan-percepatan. Salah satunya adalah dengan memberikan secara langsung Kartu Indonesia Pintar (KIP) oleh Presiden RI kepada siswa-siswa sekolah pada saat kunjungan kerjanya (kunker). Presiden RI telah menyerahkan kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 47.604 siswa di 39 Kabupaten/Kota. KIP yang dibagikan terdiri 12.860 KIP ATM (27%) dan 34.744 Kartu KIP regular/Kartu KIP Bukan ATM (73%). Untuk melihat sampai sejauhmana keefektifan dan keberhasilan program pemberian KIP ini, perlu dilakukan analisis kajian yang komprehensif.

Oleh karena itu tujuan kajian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kebijakan tentang startegi yang efektif dan efisien dalam Penyaluran, Pencairan, dan Pemanfaatan KIP ATM untuk menjamin equity serta pemanfaatan dana PIP yang efektif untuk mendukung siswa menyelesaikan dan melanjutkan pendidikannya dengan prestasi yang terbaik.

